

# KINERJA KEUANGAN PERBANKAN:

UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM PERBANKAN YANG SEHAT



Muh. Taslim Dangnga  
M. Ikhsan Maulana Haeruddin

**KINERJA KEUANGAN PERBANKAN:  
UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM  
PERBANKAN YANG SEHAT**

**Penulis:**

**Muh. Taslim Dangnga  
M. Ikhwan Maulana Haeruddin**

**Editor:  
Abdi Akbar**

**2018**

# **Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat**

Oleh :

Penulis : **Muh. Taslim Dangnga, dan M. Ikhwan Maulana Haeruddin**

Penyunting : **Abdi Akbar**

Penata letak : Zaiful

Desain sampul: TIM Penerbit

Diterbitkan oleh :

CV. Nur Lina

ISBN : 978-602-51907-2-8

Bekerjasama

Pustaka Taman Ilmu

Cetakan I Mei 2018

Hak cipta ada pada penulis

All right reserved

## **Sanksi Pelanggaran Hak Cipta**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

## KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa Buku “Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat” ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir, sebagai manifestasi keinginan penulis untuk turut serta memberikan andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena sebaik-baiknya ilmu, adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak.

Teori manajemen keuangan menyediakan banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja suatu bank, salah satu diantaranya adalah rasio keuangan. Beberapa studi yang berhubungan dengan penilaian kinerja perusahaan perbankan dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Penilaian keputusan berinvestasi dalam pasar modal dan menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan, biasanya yang dinilai adalah kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulisan buku yang berjudul Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat, perlu dilakukan untuk menyebarluaskan gagasan ilmiah terkait pemberdayaan perbankan di Indonesia. Buku ini merupakan hasil kajian penulis, yang bersumber dari penelitian penulis.

Perlu dijelaskan bahwa misi utama penulisan buku ini adalah untuk menyebarkan ilmu dan membuat penulisnya belajar dan belajar lagi. Kesempurnaan isi dan penyajian buku ini tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini selanjutnya.

Akhirnya, penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya penyebaran ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin!

Penulis,

**Muh. Taslim Dangnga**

**M. Ikhwan Maulana Haeruddin**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar \_\_\_\_ i

## BAGIAN I WACANA PERBANKAN DI INDONESIA

BAB I. Pra Wacana \_\_\_\_ 2

BAB II. Selayang Pandang \_\_\_\_ 10

## BAGIAN II BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN: PERSPEKTIF TEORITIS

BAB III. Konsep Dasar Bank & Lembaga Keuangan \_\_\_\_ 15

BAB IV. Bank Dalam Sistem Perekonomian \_\_\_\_ 25

BAB V. Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Sistem  
Perekonomian \_\_\_\_ 32

## BAGIAN III MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN

BAB VI. Sistem Keuangan Indonesia \_\_\_\_ 39

BAB VII. Pengawasan dan Kesehatan Perbankan \_\_\_\_ 43

BAB VIII. Manajemen Keuangan \_\_\_\_ 53

BAB IX. Aset Keuangan \_\_\_\_ 58

BAB X. Kinerja Keuangan \_\_\_\_ 61

## BAGIAN IV TOPIK SPESIAL:

### KINERJA KEUANGAN PT. BANK BRI TBK

BAB XI. Gambaran Umum Perusahaan \_\_\_\_ 76

BAB XII. Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
\_\_\_\_ 87

BAB XIII. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas \_\_\_\_ 89

BAB XIV. Metode \_\_\_\_ 101

BAB XV. Analisis Diskriminan Altman (*Z Score*) \_\_\_\_ 104

BAB XVI. Penutup \_\_\_\_ 111

Bahan Bacaan \_\_\_\_ 127

Tentang Penulis

**BAGIAN I**

**WACANA  
PERBANKAN  
DI INDONESIA**

## BAB I PRA WACANA

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007).

Pasca krisis ekonomi 1997, Indonesia kembali menderegulasi kebijakan-kebijakan pada sektor keuangandalam hal pengawasan. Selain itu, juga terjadi perubahan kebijakan pemerintah daerah dengan diterbitkannya UU otonomi daerah tahun 2000 dan sudah diberlakukan sejak tahun 2001 sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya berdasarkan anggaran pemerintah daerah dan bukan angggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya UU otonomi daerah maka setiap daerah harus membuat perencanaan investasi dan pengembangan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi regional yang dicapai juga optimal. Salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional adalah sektor keuangan.

Sektor keuangan sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Bank Dunia, sektor keuangan yang semakin berkembang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Namun rekomendasi tersebut masih menimbulkan perdebatan baik secara teori maupun secara empiris. Ada dua hal pokok yang masih diperdebatkan terkait perkembangan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi dan volatilitas ekonomi makro.

*Pertama*, perdebatan mengenai apakah perkembangan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (*finance – led growth*) atau pertumbuhan ekonomi yang



mendorong perkembangan sektor keuangan (*growth – led finance*) (Levine, 1997; Patrick, 2000). *Kedua*, perdebatan mengenai hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan volatilitas ekonomi makro. Perdebatan kedua terfokus pada permasalahan apakah sektor keuangan yang semakin berkembang akan menyebabkan volatilitas ekonomi makro. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, tingkat pengangguran yang rendah, fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang rendah (meredam siklus bisnis), dan tingkat inflasi yang rendah. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai kebijakan Bank Dunia (2001) yang menekankan pentingnya sektor keuangan untuk mencapai tujuan tersebut karena sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meredam volatilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, Bank Dunia menyarankan pentingnya kebijakan yang mendorong perkembangan sektor keuangan di berbagai negara di dunia.

Atas dasar itu semua, pengembangan sistem keuangan yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan memiliki ketahanan yang tinggi merupakan langkah yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kestabilan makroekonomi. Berkaitan dengan itu, salah satu aspek yang sering diperdebatkan dalam pengembangan sistem keuangan adalah menurut teori *endogenous growth* (Solow), pertumbuhan ekonomi atau output di dorong oleh *physical* maupun *human capital* yang diakselerasi oleh variabel produktitas.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai

dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menurut Sukirno (2007), pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Menurut Patrick (1966) terdapat dua kemungkinan hubungan kausalitas antara pembangunan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu: *pertama, demand-following*, bahwa rendahnya pertumbuhan sektor keuangan adalah manifestasi kurangnya permintaan akan jasa finansial. *Kedua, supply-leading*, bahwa sektor keuangan mendahului dan mendorong pertumbuhan sektor riil. *Demand-following* adalah fenomena ketika pembentukan institusi finansial modern, aset dan liabilitas, dan berbagai jasa keuangan adalah sebagai respon dari meningkatnya permintaan jasa keuangan oleh para investor dan penabung dalam sektor riil. Pada saat perekonomian riil tumbuh maka permintaan akan jasa keuangan juga akan bertambah, dengan semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan juga akan menjadi positif.

*Supply-leading hypothesis* berarti bahwa pembangunan institusi dan pasar keuangan akan meningkatkan penawaran jasa keuangan (terutama permintaan jasa oleh para pengusaha dan investor) yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi riil. *Supply-leading* mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional menuju sektor industri, dan untuk mendorong respon para pengusaha dalam sektor industri. Lembaga intermediasi yang mentransfer sumberdaya dari sektor tradisional (melalui peningkatan kesejahteraan dan tabungan dari sektor ini untuk dijadikan deposito atau dengan penciptaan kredit) sesuai dengan konsep Schumpeter tentang inovasi keuangan (Maski, 2010).

Berbagai studi komparasi lintas negara serta analisis pada level industri dan perusahaan menyimpulkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa perkembangan sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu negara. Berbagai studi empirik bahkan membuktikan bahwa perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa negara-negara yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi dengan baik adalah negara-negara yang kemudian menjadi pemimpin perekonomian dunia pada masanya. Peran vital sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi muncul karena berbeda dengan kondisi ideal yang menjadi landasan teori ekonomi Neoklasik dalam realitas sehari-hari para pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada biaya informasi dan biaya transaksi keuangan yang tinggi. Keberadaan dua jenis biaya tersebut mengakibatkan transaksi langsung antara pihak penabung/pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana tidak berjalan optimal. Akibatnya, berbagai kesempatan investasi dan konsumsi yang seharusnya dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak dapat direalisasikan.

Levine (1997) dalam lima fungsi dasar, yaitu: memobilisasi tabungan, mengalokasikan sumber daya, memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan, memfasilitasi perdagangan, lindung-nilai, diversifikasi, dan penggabungan risiko, dan memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien.

Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur, yaitu: jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua

sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara mempengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, semakin besar kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa akses pada berbagai sumber dana (investor), banyak kegiatan usaha yang hanya mampu berproduksi dalam volume relatif kecil sehingga tidak efisien. Sistem keuangan dapat menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah kecil tetapi banyak.

Hal ini dikemukakan oleh Merton dan Bodie (1995) sebagaimana dikutip oleh Levine (1997). Merton (1991) menyebutkan enam fungsi sistem keuangan yang pada prinsipnya sama dengan yang diajukan Levine (1997), yaitu: menyediakan fasilitas transaksi pembayaran, mengumpulkan dana, menyediakan mekanisme penyaluran dana antar ruang dan antar waktu, melakukan manajemen risiko, memberikan mengatasi masalah ketimpangan informasi (*asymmetric information*). Sementara itu, hipotesis terkait dengan fungsi lembaga keuangan sebenarnya jauh sebelumnya dipelopori oleh Joseph Schumpeter (1911) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian melalui 5 perannya yaitu: memobilisasi dana, mengevaluasi proyek, mengelola risiko, mengawasi para manajer, dan fasilitasi transaksi.

Distribusi aset mungkin perlu mendapatkan perhatian yang lebih daripada distribusi pendapatan. Pada negara-negara industri, di mana hambatan ke pasar kredit relatif lebih kecil daripada di negara sedang berkembang (NSB) nilai distribusi aset (yang diukur dengan warisan kekayaan) merupakan

variabel kunci untuk mengukur kemampuan individu memulai suatu usaha dan meningkatkan distribusi pendapatannya (Bardhan et. al, 1998). Di China ditemukan hubungan yang negatif dan signifikan antara distribusi aset lokal dengan pertumbuhan konsumsi individual (Ravallion, 1997).

Untuk memaksimalkan keuntungannya, sebuah bank harus terus menerus mencari kemungkinan imbal hasil tertinggi atas kredit dan surat berharga, mengurangi risiko dan mencukupi kebutuhan likuiditas dengan memiliki aset yang likuid. Bank-bank berupaya untuk memenuhi ketiga tujuan ini dengan empat cara dasar.

Pertama, bank berupaya menemukan peminjam yang akan membayar suku bunga tinggi dan kecil kemungkinan gagal bayar. Mereka mencari usaha pemberian pinjaman dengan mengiklankan suku bunga pinjamannya dan dengan mendekati perusahaan secara langsung untuk menawarkan pinjaman. Kedua, Bank berupaya untuk membeli surat berharga dengan imbal hasil tinggi dan risiko rendah. Ketiga, dalam mengelola asetnya, bank harus mencapai risiko yang lebih rendah dengan cara mendiversifikasi. Mereka mencapainya dengan membeli beberapa macam aset dan menyetujui beberapa jenis kredit kepada berbagai nasabah. Terakhir, bank harus mengelola likuiditas dari asetnya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi giro wajib minimum tanpa menanggung beban yang besar. Dua aset dari neraca bank sentral penting karena dua alasan. Pertama, perubahan dalam aset mendorong perubahan cadangan dan mengakibatkan perubahan uang beredar. Kedua, karena aset-aset ini (surat utang pemerintah dan *discount loan*) menerima pendapatan bunga, sedangkan kewajiban tidak menghasilkan bunga.

Bencivenga dan Smith (1991) mengembangkan model dimana individu menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan likuiditasnya di masa depan. Individu dapat memilih investasi pada aset yang likuid dan tidak berisiko, namun mempunyai

tingkat produktivitas yang rendah, dan atau memilih investasi pada aset yang tidak likuid dan berisiko, namun mempunyai tingkat produktifitas yang rendah, dan atau memilih investasi pada aset yang tidak likuid dan berisiko, namun mempunyai tingkat produktifitas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran tabungan ke proyek-proyek yang mempunyai tingkat produktifitas yang tinggi dan sekaligus dapat menurunkan risiko likuiditas yang dihadapi oleh individu.

Selain menurunkan risiko likuiditas, sektor keuangan juga dapat menurunkan risiko investasi. Ketika individu tidak menyukai risiko, maka investasi yang berisiko akan menwarakan pendapatan yang tinggi, sedangkan investasi yang kurang berisiko akan menawarkan pendapatan yang rendah. Sektor keuangan yang memiliki kemampuan dalam melakukan diversifikasi terhadap risiko, selain dapat menurunkan risiko yang dihadapi oleh masyarakat juga akan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menabung.

Salah satu kegiatan industri perbankan adalah pemberian kredit. Menurut Siamat (2004), proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan tersebut didanai oleh beberapa sumber yaitu modal sendiri, pinjaman dari lembaga lain, dan pihak ketiga atau masyarakat. Menurut Kasmir (2004), dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit. Kredit diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank (Dendawijaya 2005:35). Dana dari masyarakat yang sering disebut dengan dana pihak ketiga

terdiri atas beberapa jenis yaitu Giro (*Demand Deposit*), Tabungan (*Saving Deposit*) dan Deposito (*time deposit*).

Berdasarkan hipotesis Keynes tingkat pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap tabungan nasional (dalam Darmawan, 2006). Penelitian ini menemukan bahwa pendapatan nasional perkapita mempunyai efek positif terhadap tingkat tabungan nasional. Sementara itu studi *cross-sectional* komprehensif pertama kali dilakukan oleh Simon Kuznet mengenai hubungan antara tabungan dan pendapatan per kapita pada tahun 1960.

Menurut Keynes pengaruh tingkat bunga terhadap tabungan nasional sangat kompleks serta banyak kemungkinan yang akan terjadi. Di samping itu juga membutuhkan *lag* yang cukup lama (Molho, 1986). Arrieta (1988) dalam studinya menyimpulkan bahwa tingkat bunga berpengaruh positif terhadap tabungan nasional. Muradoglu dan Taskin (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa efek tingkat bunga dapat dijelaskan dari keputusan konsumsi intertemporer. Peningkatan pengembalian tabungan akan meningkatkan tabungan tetapi efek pendapatan riil terhadap tingkat pengembalian mengakibatkan tabungan menurun.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1998 dalam pasal 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan sangat penting. Oleh diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain.

## BAB II

### SELAYANG PANDANG

Bank sebagai salah satu bentuk lembaga ekonomi yang bertujuan mengejar keuntungan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peranan pimpinan perusahaan sangat berperan dalam menentukan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Seperti kita lihat sekarang persaingan perbankan di Indonesia dirasakan semakin kompetitif.

Bank mempunyai arti yang sangat penting dalam pembentukan modal baik melalui tabungan maupun penciptaan uang, dimana bank menampung dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan dana guna tambahan modal dari peningkatan usahanya.

Sebagai salah satu Bank Nasional, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar haruslah senantiasa menjaga kualitas kinerja karena hal ini akan memberikan jaminan bahwa dana masyarakat yang disimpan akan aman. Sebagai salah satu bank yang telah *Go Public*, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang Makassar wajib menyampaikan laporan keuangannya sebagai acuan kinerja keuangan bank baik kepada para pemegang saham ataupun masyarakat sebagai pemilik dana, sehingga hasil penilaian kinerja keuangan di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Makassar dapat dijadikan acuan bagi para pemegang saham ataupun para pemilik dana (masyarakat) untuk menyimpan uangnya atau menginvestasikan dananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Makassar adalah salah satu



Bank BUMN yang mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 *New York Agency*, 1 *Caymand Island Agency*, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 3.705 BRI Unit, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 *Payment Point*, dan 357 Pos Pelayanan Desa sebagai garda depan dalam pengembangan bisnisnya.

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Makassar adalah salah satu dari sekitar 170 cabang yang ada di seluruh Indonesia.Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis yang mampu menginformasikan kondisi dan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar yang tujuannya untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya.

Untuk menilai perkembangan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia(persero) Tbk cabang Makassar dapat diketahui dengan menelaah kondisi keuangannya dengan cara melakukan penganalisaan terhadap laporan keuangan. Penganalisaan terhadap laporan keuangan penting untuk dilakukan pada setiap periode sehingga dapat diketahui kinerja keuangan.

Tabel 1. Posisi Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

Tahun	Aktiva	Kewajiban	Modal	Profit
2013	86.344.896.000	80.550.792.000	5.794.104.000	1.524.940. 000
2014	94.709.726.000	85.715.486.000	8.994.240.000	2.502.435.000
2015	107.040.172.000	94.589.878.000	12.450.294.000	3.633.228.000
2016	122.775.579.000	109.422.597.000	13.352.982.000	3.808.587.000

Sumber : Pusat Informasi Pasar Modal.

Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir jumlah aktiva tahun 2013 sebesar Rp 86.344.896.000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 94.709.726.000 atau mengalami peningkatan sebesar 9,69% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 13,02% atau sebesar Rp 107.040.172.000 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 122.775.579.000 atau mengalami peningkatan sebesar 14,7%.

Pada tahun 2013 jumlah kewajiban sebesar Rp 80.550.792.000 dan pada tahun 2014 jumlah kewajiban sebesar Rp 85.715.486.000 mengalami peningkatan sebesar 6,41% dan peningkatan terus terjadi pada tahun 2015 sebesar 10,35% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 jumlah kewajiban sebesar Rp. 94.589.878.000 dan pada tahun 2016 jumlah kewajiban sebesar Rp. 109.422.597.000, atau mengalami peningkatan sebesar 15,68%. Pada tahun 2013 di sisi modal mencapai 5.794.104.000 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 8.994.240.000 atau meningkat 55,23% pada tahun 2015 mencapai Rp 12.450.294.000 meningkat sebesar 38,4% dan tahun 2016 sebesar Rp 13.352.982.000 atau mengalami peningkatan meskipun kecil sebesar 7,25%. Dengan demikian terjadinya peningkatan jumlah aktiva PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk disebabkan oleh peningkatan jumlah kewajiban yang lebih besar dari peningkatan jumlah di sisi modal, di mana peningkatan di sisi kewajiban dalam empat tahun terakhir sebesar 15,68% sedangkan di sisi modal meningkat sebesar 7,25%. Dengan kata lain PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah tabungan masyarakat. Selanjutnya di sisi laba bersih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan 4,83%.

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian-kajian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan kinerja keuangan perusahaan perbankan seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam memenuhi kewajibannya maupun untuk

meningkatkan keuntungan penting untuk dilakukan, sehingga tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk melakukan kajian tersebut.

## **BAGIAN II**

# **BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN: PERSPEKTIF TEORITIS**

# **BAB III**

## **KONSEP DASAR BANK & LEMBAGA KEUANGAN**

### **A. Definisi Bank**

Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai tempat untuk menukar uang, dan memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Dimulai sejak zaman Babylonia, tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar-menukar mata uang, kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman sebagai imbalannya. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia dibawa oleh bangsa Eropa yang datang ke Asia saat melakukan penjajahan di negara-negara jajahannya. Seperti pada mulanya bank mulai ada di negara Indonesia karena dibawa bangsa Belanda pada saat menjajah bangsa Indonesia. Pada saat itu ada beberapa bank yang memegang peranan penting di Indonesia dimana pada masa penjajahan lebih dikenal dengan nama Hindia Belanda.

Bank merupakan lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (suplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus). Bank menerima simpanan dana dari pihak yang kelebihan dana misalnya dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam hubungannya

dengan bank ini, maka akan dikemukakan beberapa pengertian bank sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 tahun 1998 Bab II Pasal 1 ayat 2, menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pengertian lainnya, menurut Hasibuan (2004) bahwa Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial. Jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Dendawijaya (2001) bahwa: Bank merupakan salah satu usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Selanjutnya Kasmir (2000) menyatakan bahwa: Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sementara Sinungan (1997), menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan yaitu badan yang berfungsi sebagai financial intermediary, atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

## **B. Fungsi Bank**

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi *financial intermediary*. Selain fungsi bank secara umum, terdapat juga fungsi bank secara spesifik. Ada 3 fungsi utama bank secara spesifik, yaitu:

*Agent of Trust*. Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (*trust*). Kepercayaan disini meliputi

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut.

Masyarakat yakin dan percaya, dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan tersebut untuk dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan.

Bank tidak akan khawatir apabila debitur akan menyalahgunakan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya debitur memiliki kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan yang masuk akal. Selain itu, bank percaya bahwa debitur akan memiliki niat untuk membayar meskipun saat jatuh tempo.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan balas jasa kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan dan lain-lain. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya.

*Agent of Development.* Sektor riil dan sektor moneter adalah dua hal perekonomian yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Jika salah satunya bekerja kurang baik maka berpengaruh juga pada sisi lainnya. Disini bank difungsikan memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak dapat terpisahkan dari penggunaan uang. Jika semua kegiatan itu berjalan lancar, tentu akan banyak membantu dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

*Agent of Service.* Selain kegiatan utama bank menghimpun dan menyalurkan uang, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa

yang ditawarkan bank ini erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa disini berupa pengiriman uang, barang berharga, pemberian jaminan bank maupun penyelesaian tagihan.

### **C. Jenis-Jenis Bank**

Menurut Undang-Undang Perbankan, praktik perbankan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis bank yang dilihat dari berbagai segi yaitu jenis bank yang dilihat dari segi fungsinya, kepemilikannya, status dan dari segi cara menentukan harganya.

#### **1. Jenis Bank Dilihat dari Fungsi**

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya, antara lain:

- a. Bank Sentral, yaitu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
- b. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum disini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (*commercial bank*).
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit



daripada bank umum, dimana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut kliring dan transaksi valuta asing.

## **2. Jenis Bank Dilihat dari Kepemilikan**

Dilihat dari definisi bank, kepemilikan dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan.

- a. Bank Milik Pemerintah: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara dan lain-lain.
- b. Bank Milik Swasta Nasional: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon dan lain sebagainya.
- c. Bank Milik Asing: Citibank, Standard Chartered Bank dan lain sebagainya.
- d. Bank Campuran: Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, Bank Sakura Swadarma, dan bank lainnya.

## **3. Jenis Bank Dilihat dari Status**

Status yang menjadi acuan pembagian jenis bank disini yang dimaksud adalah ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat dalam segi jumlah produk, modal serta kualitas pelayanan

- a. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau kegiatannya berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contohnya: transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*.
- b. Bank Non Devisa merupakan bank yang mempunyai hak untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa namun wilayah operasinya dibatasi untuk negara-negara tertentu saja.

#### 4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Berdasarkan dari caranya menentukan harga, bank dibagi menjadi:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional: Menerapkan metode penetapan harga sesuai tingkat suku bunga (*spread base*) dan metode *fee base* (menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan).
- b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah: Menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya. Dalam menentukan harga, bank syariah menerapkan prinsip syariah sebagai berikut:
  - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
  - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
  - 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*)
  - 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
  - 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtana*)

#### D. Lembaga Keuangan

Perusahaan merupakan kombinasi dan berbagai sumber daya ekonomis (*resources*) seperti alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai tujuan perusahaan antara lain: untuk memperoleh keuntungan maksimal, menjamin kelangsungan hidup perusahaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, dan beberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai

perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.

Secara umum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama perusahaan keuangan (*financial enterprise*) dan kedua, perusahaan bukan keuangan (*non financial enterprise*). Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang misalnya: mobil, baja, komputer dan atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non keuangan misalnya: transportasi dan pembuatan program komputer. Sedangkan perusahaan keuangan, umurnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan (*financial institution*), yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan.

Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku (Rose & Frasser, 1988).

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau mennginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (*fnauial market*). Lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai dan perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pemhayaran dana dan transfer dana.

Proses transfer dana yang terjadi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang memhutuhkan dana (*deficit unit*) pada umumnya sangat mernenlukan perantara atau mediator lembaga keuangan. Proses intermediasi

tersebut memberikan dua manfaat utama. Pertama, memberikan kesempatan kepada pihak surplus unit untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan, sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur. Kedua, proses tersebut akan memindahkan risiko dan penabung yaitu surplus unit kepada lembaga keuangan kepada pemakai dana (*deficit unit*). Jadi, keberadaan lembaga keuangan tersebut, dimaksudkan agar proses alokasi atau transfer dana dan pihak surplus unit kepada pihak *deficit unit* bisa berjalan lebih efisien.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi di Inggris), *credit union*, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain).

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan

asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi.

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut:

### **1. Pengalihan Aset (*Asset Transfer*)**

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmudasi kekayaan atau *asset transmutation*.

### **2. Likuiditas (*Liquidity*)**

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dirnaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

### **3. Realokasi Pendapatan (*Income Reallocation*)**

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau merealokasikan

pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya : tanah, rumah dan sebagainya, namun pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

#### **4. Transaksi (*Transaction*)**

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan misalnya rekening giro, tabungan, (deposito dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder (misalnya giro) untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya sehari-hari. Dengan demikian lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter.

## BAB IV

### BANK DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus,

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila diamati akar penyebabnya (*root causes*) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Hal ini menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan (*practices and governance*) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan *leasing*, perusahaan-perusahaan *hire-purchase*, perusahaan-perusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaan *forfeiting*, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai *debt instruments*nya seperti *promissory notes* dan obligasi serta *equity instrument*nya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit yang berisiko tinggi yang pada

gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (*direct regulation*) maupun peraturan tidak langsung (*indirect regulation*). Peraturan langsung bertujuan mengurangi kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan *risk-based capital*. Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan yaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (*safe and sound banking*).

Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang



berlaku. Perlu pula dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak terjadinya konsentrasi bisnis. Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank.

Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh Adam Smith sebagai berikut:

*“Being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance with which partners in a private copartnery frequently watch over their own... Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company.”*

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah. Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.

Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu. Demikian bank terexpose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan. Alan Greenspan

mengatakan “*When confidence in the integrity of a financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened.*”

Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat menyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer Principe*) dan jugamenerapkan prinsip kenali karyawan (*know your employee*). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat.

Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk penyelesaian bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi *rush*, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah

“dikeluarkan” dari industri perbankan. Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang *corruption-resistant* sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank.

Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang jalin-menjalin. *Pertama*, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan *self dealing*. *Kedua*, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh. Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan maksimal.

Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerja bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahan maksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dari informasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi seperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan dimana informasi yang tersedia

tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.

Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangat berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan. Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :

*"The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity. This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of the European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso (in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot be indifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets can be harsh teachers at times, the constraints that impose discipline our policy choices and remind us every day of our longer run responsibilities."*

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disiplin pasar. Melibatkan *internal governance* dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan *punitive* atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya menghindari kemungkinan *bailout* oleh pemerintah.

## **BAB V**

### **LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM SISTEM PEREKONOMIAN**

Sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa di laksanakan dengan cara sederhana, misalnya barter yaitu : transaksi barang dan jasa yang dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar barang atau pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang/jasa.

Sejalan dengan perkembangan waktu yang seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa, maka kegiatan transaksi dalam perekonomian tidak dapat lagi dijalankan hanya dengan cara barter saja. Cara transaksi barang dan jasa modern diawali dan ditandai dengan adanya “perantara“ dalam kegiatan. Perantara dapat diartikan sebagai pelaku pasar atau sebagai bangunan fisik pasar, dalam arti yang sebenarnya. Perantara sebagai penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa.

Dengan adanya perantara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Kehadiran pihak perantara, baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik, menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian.

Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan/lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa

diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.

Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi.

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentranfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit devisa. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dengan memakai dana melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satuan obligasi, promes, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, dana yang

dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali kepada unit defisit dan unit defisit akan membayar biaya bunga kepada Lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan.

Secara umum lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan tersebut diatas, maka fungsi lembaga keuangan yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah "*transmission role*". Media uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar atau alat yang memperlancar pertukaran yang pada tahap perekonomian ini, pertukaran dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran secara kredit (instrumen kredit) seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain.
2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang berlebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi lembaga keuangan yang demikian ini sering disebut dengan "*intermediation role*", yaitu peran lembaga



keuangan sebagai lembaga perantara antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu :
  - a. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain (nasabah).
  - b. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
  - c. Analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah.
4. Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya, dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis dan informasi ekonomi mikro dan makro (dalam analisis dan informasi ekonomi mikro), lembaga keuangan akan meneliti kelayakan nasabah dalam memperoleh dana pinjaman sehingga nasabah dapat membayar pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan (self liquidating), sedangkan pada analisa dan informasi ekonomi makro, lembaga keuangan akan melakukan studi perekonomian secara nasional sehingga diperoleh data perekonomian makro yang bermanfaat.
5. Memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
6. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu

memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

Untuk menguatkan dana tabungan yang dapat digali dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit maka perlu dilakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut antara lain: melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga (operasi pasar terbuka); membuat perubahan ke atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum, dan membuat perubahan keatas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum.

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lain).

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi atau *transaction*.

## **BAGIAN III**

# **MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN**

## BAB VI

### SISTEM KEUANGAN INDONESIA

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal.

Karakteristik dari sektor keuangan yang paling dominan yang dapat kita amati ialah begitu cepatnya perubahan yang terjadi di dalamnya seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang keuangan, moneter, dan perbankan dari waktu ke waktu perlu dilakukan penyesuaian mengikuti dinamika ekonomi sebagai dampak dari globalisasi dimana perubahan yang terjadi pada ekonomi suatu negara, terutama negara-negara maju, pasti akan berdampak pula pada perekonomian negara lain, terutama pada kegiatan pada bursa saham suatu negara. Sistem keuangan merupakan salah satu rancangan yang paling krusial dalam waktu modern ini.

Kita tidak dapat membayangkan, apabila semua aktivitas keuangan antara suatu lembaga dengan lembaga keuangan lain, maupun antara suatu negara dengan negara lain, dilakukan tanpa adanya mediasi suatu sistem keuangan yang baik, maka semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi akan amburadul atau tidak akan dapat menyenangkan semua pihak disebabkan tidak terkoordinasi dengan baik. Sistem pembayaran dan intermediasi tidak mungkin akan terlaksana tanpa adanya sistem keuangan.

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (*financial*

*services*) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem keuangan merupakan kumpulan lembaga-lembaga keuangan (bank, lembaga asuransi, dan sebagainya), berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan, yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara, demi kemajuan perekonomian negara tersebut.

Tugas utama sistem keuangan dalam perekonomian modern adalah memindahkan dana dari penabung kepada peminjam yang membutuhkan dana, dimana dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta melakukan investasi dalam bentuk peralatan-peralatan baru sehingga perekonomian dapat tumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan standar kehidupan. Tanpa suatu sistem keuangan, kekuatan dan kemampuan sektor usaha maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya maupun dalam berinvestasi akan berkurang. Sementara itu, pemilik dana yang berlebih tidak akan dapat mengoptimalkan pendapatan dari dana mereka yang berlebih tersebut dan akan membuat semakin banyaknya *idle money* atau uang yang tidak dipergunakan (uang menganggur).

Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki sekurang-kurangnya 7 fungsi pokok, yaitu:

1. Fungsi tabungan (*savings function*), sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya: obligasi, saham dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrumen-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik lagi.

2. Fungsi kekayaan (*wealth function*), suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain, dimana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Bandingkan apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli mobil sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai mobil tersebut akan berkurang dari waktu ke waktu akibat mengalami penyusutan.
3. Fungsi likuiditas (*liquidity function*), kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil, apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai. Uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi, dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan.
4. Fungsi kredit (*credit function*), pasar keuangan disamping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan.
5. Fungsi pembayaran (*payment function*), sistem keuangan juga menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan antara lain: cek, giro, kartu kredit dan kartu debit.

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya: kliring, transfer elektronik, phone banking, dan banyak lagi. Mekanisme pembayaran atau transfer secara on line menjadi suatu trend baru yang dilakukan oleh pihak perbankan, dan juga dapat menjadi suatu alternatif bagi perbankan dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan *fee base income* mereka.

6. Fungsi resiko (*risk function*), sistem keuangan dewasa ini memberikan/menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan resiko kerugian terhadap semua unit usaha dan konsumen. Polis asuransi diberikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan proteksi terhadap kemungkinan hilangnya penghasilan nasabah mereka.



## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN KESEHATAN PERBANKAN**

Segi terminologi sistem perbankan terdiri dari kata sistem dan perbankan, dimana “sistem” adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan “perbankan” adalah segala sesuatu mengenai bank. Berdasarkan terminologi tersebut dapat dipahami bahwa sistem perbankan adalah sebuah sistem yang menyangkut segala sesuatu mengenai bank. Sistem perbankan juga senantiasa dinamis mengikuti arah ekonomi global.

Demikian pula sistem perbankan yang ada di Indonesia, beberapa kali mengalami perubahan yang ditandai dengan peralihan rezim undang-undang perbankan yang berlaku di masanya. Dimulai jaman penjajahan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, hingga sekarang, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem perbankan. pengawasan perbankan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, bank menghimpun dana masyarakat dengan dasar kepercayaan. Kedua, bank merupakan bagian penting dalam kerangka sistem pembayaran dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ketiga, sektor perbankan menyumbang peran besar dalam pembangunan ekonomi. Dan keempat, bank sangat rentan terhadap berbagai macam risiko. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama mengapa bank harus diawasi. Bank adalah unit usaha yang khusus dimana jalannya kegiatan operasional bank tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Maka kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dari pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank.

Kegagalan suatu bank, khususnya yang bersifat sistemik, dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian terlebih jika negara tersebut menganut sistem keuangan yang berbasis bank,

dimana bank memegang peran dominan dalam pergerakan ekonominya, seperti di negara-negara berkembang yang industri perbankannya mendominasi total aset industri keuangan. Dalam kondisi demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi negara secara luas. Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa bank adalah lembaga keuangan yang sangat rentan terhadap risiko. Bagaimanapun baik atau sehatnya bank, apabila terjadi krisis kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana dari masyarakat secara besar-besaran, maka dapat dipastikan bank tersebut akan hancur. Sistem pengawasan perbankan di Indonesia cukup dinamis, mengalami beberapa kali perubahan seiring bergantinya rezim peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perbankan.

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, serta sesuai cara-cara yang terdapat pada peraturan perbankan yang berlaku karena kesehatan bank memang mencakup seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan usaha tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri;
2. Kemampuan mengelola dana;
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat;
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain; dan
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Produktifitas sebuah usaha perbankan tidak dapat dilihat hanya dari aspek seberapa besar dana masyarakat yang dikelola, pelayanan yang memuaskan, atau besarnya keuntungan bank itu saja namun ada hal yang lebih penting dari itu semua, yakni kesehatan bank. Untuk itu bank dikatakan dalam kondisi sehat apabila bank dapat menjalankan fungsi-

fungsinya dengan baik, dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi tersebut, bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan bermanfaat bagi perekonomian secara makro. Dengan demikian menjadi wajar ketika pemerintah mempunyai kepentingan dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan khususnya perbankan. Melalui pengawasan dan pengaturan tersebut dapat diterapkan kebijakan yang sesuai, sehingga sektor perbankan terus berkembang dan terwujud sistem perbankan yang kuat pada akhirnya perekonomian secara makro akan terus tumbuh dan berkembang dan menyejahterakan masyarakat.

Untuk menilai tingkat kesehatan bank, banyak negara menggunakan *CAMELS rating*, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menilai tingkat kinerja dan kondisi perbankan yang terdiri dari pertama, aspek kecukupan modal, untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk memikul risiko yang mungkin timbul. Modal merupakan benteng pertahanan utama bank. Kekurangan modal dapat bersumber dari dua hal, yaitu modal yang jumlahnya kecil dan kualitas modal yang buruk. Aspek ini tidak hanya dilihat dari jumlah nominalnya saja, tetapi dari rasio kecukupan modal, atau yang lazim disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Kedua, kualitas aktiva produktif, dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu bank terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi bank, sehingga disebut dengan aktiva produktif. Ketiga, kualitas manajemen, untuk memastikan kualitas dan tingkat kedalaman penerapan prinsip manajemen bank yang sehat, terutama yang terkait dengan manajemen risiko. Manajemen yang kompeten

dan memiliki integritas yang tinggi merupakan pertahanan atas risiko bank.

Penilaian ini dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bank yang bersangkutan. Keempat, rentabilitas/keuntungan untuk memastikan efisiensi dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat. Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio, yaitu rasio laba sebelum pajak dalam dua belas bulan terakhir dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, dan rasio biaya operasional dalam dua belas bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Kelima, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar, untuk memastikan dilaksanakannya manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang cukup serta mengurangi *exposure* yang sensitif terhadap risiko suku bunga. Aspek ini merupakan masalah yang sangat krusial dalam industri perbankan.

Dengan demikian, pengelolaan likuiditas yang baik sangat menentukan bagi suatu bank, dan masalah likuiditas ini harus dipantau secara terus-menerus oleh pengawas bank. Demikian juga laporan bank kepada publik untuk keperluan transparansi, selalu menyertakan laporan yang memuat rasio yang terkait dengan kondisi likuiditas suatu bank, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang risiko likuiditas suatu bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Rasio kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain.

Sistem pelaksanaan pengawasan perbankan adalah sebuah sistem yang menyangkut segala sesuatu mengenai bank, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, sistem perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan mencakup permasalahan mengenai: a. asas,

fungsi, dan tujuan; b. jenis-jenis usaha bank; c. perizinan, pemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank; dan d. persyaratan dan prosedur pendirian bank. Pengawasan perbankan harus diawasi dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, bank menghimpun dana masyarakat dengan dasar kepercayaan. Kedua, bank merupakan bagian penting dalam kerangka sistem pembayaran dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ketiga, sektor perbankan menyumbang peran besar dalam pembangunan ekonomi. Keempat, bank sangat rentan terhadap berbagai macam risiko. Dari keempat faktor tersebut, kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama mengapa bank harus diawasi.

Bank adalah unit usaha yang khusus dimana jalannya kegiatan operasional bank tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Maka kelangsungan hidup suatu bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pengertian inilah timbul istilah bank sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mengakibatkan kegagalan suatu bank.

Kegagalan suatu bank, khususnya yang bersifat sistemik, dapat mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian. Dalam kondisi demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak dapat berfungsi secara optimal, maka dapat dipastikan akan berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi negara secara luas, Karena itu perbankan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah di berbagai negara.

Deskripsi di atas, dapat bisa dipahami bahwa bank adalah lembaga keuangan yang sangat rentan terhadap risiko. Bagaimanapun baik atau sehatnya bank, apabila terjadi krisis kepercayaan yang mengakibatkan penarikan dana dari masyarakat secara besar-besaran, maka dapat dipastikan bank tersebut akan hancur. Masyarakat penyimpan dana di bank pada umumnya memiliki informasi yang sangat terbatas mengenai kondisi bank tempat ia menyimpan dananya.

Ketidak pastian atas kondisi kesehatan suatu bank dapat mengakibatkan penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan secara besar-besaran. Rush terhadap perbankan ini pada umumnya menular dan tidak pandang bulu, dan dapat terjadi pada bank dalam kondisi sehat maupun tidak sehat. Kejadian ini sering disebut sebagai masalah perbankan yang bersifat sistemik. Jika kepercayaan masyarakat tidak segera dipulihkan, dapat dipastikan akan terjadi krisis ekonomi yang serius. Masalah perbankan yang bersifat sistemik terjadi karena adanya masalah yaitu suatu kondisi dimana ketika salah satu pihak yang bertransaksi mempunyai informasi yang kurang atau tidak seimbang dengan informasi yang dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal ini ketidak seimbangan informasi antara bank dan masyarakat selaku deposan. Masyarakat memiliki informasi yang kurang mengenai kondisi keuangan dan kesehatan suatu bank, sehingga masyarakat sulit untuk membedakan mana bank yang sehat dan mana bank yang tidak sehat.

Masyarakat akan mengalami kerugian karena pada saat itu kemungkinan besar masyarakat tidak akan mendapatkan dananya kembali secara penuh. Dalam kondisi yang demikian, maka diperlukan pengaturan dan pengawasan perbankan untuk melindungi kepentingan masyarakat deposan tersebut.

Pengaturan dan pengawasan yang dimaksud bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga- lembaga perbankan selalu berada dalam keadaan sehat.

Berbagai Perspektif dalam Sistem Perbankan, Robert Hauswald berpendapat bahwasanya lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat bervariasi berlakunya di suatu negara Pemberlakuan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi di negara tersebut . Variasi tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dilihat dari perspektif produknya, sistem perbankan di dunia secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *universal banking* dan *specialized banking*.

Sistem perbankan juga senantiasa dinamis mengikuti arah ekonomi global, demikian pula sistem perbankan yang ada di Indonesia, beberapa kali mengalami perubahan yang ditandai dengan peralihan rezim undang-undang perbankan yang berlaku di masanya. Perkembangan usaha perbankan tidak hanya berkembang dari segi kuantitas lembaganya saja, namun dari aspek yang paling luas, terkait sistem perbankan hingga hal yang paling teknis dari usaha perbankan tersebut. Semakin maju dan berkembang perekonomian global, semakin kuat tekanan dan arus global terhadap sektor ekonomi nasional, khususnya perbankan. Sehingga aspek keamanan dan kestabilan sektor keuangan perlu ditingkatkan.

Kegagalan sebuah bank sangat mungkin untuk menular ke bank-bank lain yang dapat mengakibatkan krisis perbankan di sebuah negara. Tidak menutup kemungkinan krisis tersebut merambat ke negara-negara yang lain di dunia tanpa pandang bulu. Didasarkan pada pemahaman bahwa kelemahan sistem perbankan negara yang maju maupun berkembang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan di negara tersebut maupun negara-negara di seluruh dunia. Tugas dari otoritas pengawas melalui prinsip-prinsip pengawasan tersebut untuk memastikan sistem perbankan berjalan sesuai perannya dalam perkembangan ekonomi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Sistem pengawasan perbankan itu sendiri secara fungsi merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga keuangan yang lebih luas membagi fungsi pengawasan lembaga keuangan tersebut menjadi tiga, yaitu:

1. *Macprudential Supervision*. Pengawasan ini bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil, berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan, antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan lembaga keuangan apabila terdapat potensi ketidak

seimbangan di sejumlah lembaga keuangan, serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan lembaga keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara. Lebih rinci, pengawasan ini meliputi semua kegiatan yang bertujuan untuk memantau kemungkinan risiko sistemik dan mengidentifikasi potensi ancaman stabilitas yang timbul dari perkembangan pasar keuangan dan infrastruktur pasar secara makro.

2. *Microprudential Supervision*. Bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu sesuai dengan peraturan yang dibuat otoritas keuangan. Otoritas keuangan melakukan kewenangan regulasi dan supervisi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pengawasan yang dilakukan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Laku Bisnis. Menekankan pada perlindungan konsumen, transaksi antar perusahaan, dan hal-hal lainnya termasuk tindakan pencucian uang. Pengawasan lembaga keuangan, baik makro, mikro, maupun laku bisnis dilakukan oleh otoritas pengawas atau lembaga pengawas masing-masing.

Jenis pengawasan perbankan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan perbankan yang mengawasi bank secara individual, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Laporan tersebut berupa laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba-rugi serta berbagai laporan yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan/ketentuan



yang ditetapkan, dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggaranannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan berbagai pihak. Penilaian itu menjadi dasar untuk menindak lanjuti, baik dengan memberikan koreksi, remedi, ataupun sanksi.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawasan bank memastikan kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepadanya. Pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum, yang umumnya dilaksanakan satu tahun sekali, dan pemeriksaan khusus, dimana fokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

Efektivitas pengawasan lembaga keuangan tidak hanya ditentukan pada faktor prinsip-prinsip yang diterapkan ataupun regulasi yang ketat, namun penerapan model struktur pengawasan juga sangat menentukan efektivitas pengawasan karena struktur akan menentukan pola komunikasi dan koordinasi antar otoritas pengawas.

Dilihat dari strukturnya, model pengawasan lembaga keuangan di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu : *Multi Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-masing industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, adalah sebagai berikut:

1. *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang

pembagiannya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market conduct*. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Canada.

2. *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Model ini diterapkan oleh negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti antara lain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman. Dengan demikian efektivitas dalam penerapannya untuk setiap negara didasarkan pada faktor-faktor lokalnya sehingga tidak ada satu model yang pasti cocok dan optimal untuk diterapkan di setiap negara.

## BAB VIII

### MANAJEMEN KEUANGAN

Di dalam sebuah perusahaan, suatu pengaturan keuangan biasa disebut juga sebagai *financial management* atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah caranya agar bisa mendapatkan pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut serta mengelola asset yang telah dimiliki perusahaan guna mencapai tujuan utama pada suatu perusahaan.

Menurut pendapat yang lainnya, definisi dari manajemen keuangan dapat di artikan sebagai suatu manajemen dana baik itu yang berhubungan dengan permasalahan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana dalam pembiayaan investasi maupun pembelanjaan secara efisien.

Meskipun fungsi dari seorang manajer keuangan pada tiap perusahaan belum tentu sama tetapi prinsip utama seorang manajer keuangan pasti sama yaitu merencanakan, mencari serta memanfaatkan dengan berbagai cara guna memaksimalkan daya guna dari operasi-operasi perusahaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajemen keuangan mempunyai kepentingan dalam bagaimana cara menciptakan serta menjaga nilai ekonomis suatu perusahaan. Hasilnya, semua pengambilan keputusan tentu harus difokuskan kepada penciptaan kesejahteraan para pegawainya.

Manajemen keuangan merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya dalam suatu perusahaan, seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi dan fungsi personalia karena manajemen keuangan merupakan fungsi yang bertanggung jawab pada masalah kelangsungan hidup perusahaan serta bagaimana mendapatkan dan mengalokasikan dana perusahaan secara efisien dan efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Riyanto (1998) memberikan pengertian manajemen bahwa manajemen keuangan atau pembelanjaan perusahaan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pembelanjaan dalam perusahaan meliputi:

1. Fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif investasi atau keputusan investasi.
2. Fungsi pendanaan yang dalam pelaksanaannya manajer keuangan harus mengambil keputusan pemilihan alternatif pendanaan atau keputusan pendanaan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelanjaan perusahaan atau manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Tujuan dari manajemen keuangan telah terlihat dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang, tujuan utamanya yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk:

1. Memaksimalkan keuntungan: seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang sebab ketidakpastian bisnis tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal bahkan dalam jangka waktu yang panjang apabila manajer keuangannya mengambil

- suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik.
2. Menjaga arus kas (*cash flow*). suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Arus kas tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan
  3. Mempersiapkan struktur modal: seorang manajer keuangan harus dapat memutuskan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar dapat seimbang.
  4. Pemanfaatan keuangan yang tepat: manajer keuangan harus bisa memanfaatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan perusahaan dalam proyek yang tidak menguntungkan bagi perusahaan.
  5. Memaksimalkan kekayaan: jadi seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan
  6. Meningkatkan efisiensi: manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan
  7. Kelangsungan hidup perusahaan: perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan sebab apabila salah dalam mengambil keputusan bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi.

8. Mengurangi resiko operasional: manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi resiko operasional. Terdapat banyak resiko ketidakpastian dalam bisnis namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi resiko ini.
9. Mengurangi biaya modal: manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan.

Fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta dari mana modal akan di peroleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat.

Penjelasan mengenai fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

1. *Planning* atau perencanaan keuangan. Hal ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan.
2. *Budgeting* atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan.
3. *Controlling* atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan.
4. *Auditing* atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan.
5. *Reporting* atau pelaporan keuangan yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi

keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan.

Seorang manajer keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentunya terhadap apa yang sudah dilakukannya. Pengambilan keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Investment decision*: berkaitan dengan masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternative investasi yang di nilai memiliki keuntungan
2. *Financing decision*: berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternative pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah.
3. *Dividend decision*: berkaitan dengan masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.

## **BAB IX**

### **ASET KEUANGAN**

Asset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai artinya dapat kita jual dan mendapatkan uang. Asset dibagi menjadi dua yaitu:

1. Asset berwujud, yaitu asset yang nilainya sesuai dengan wujudnya, misalnya bangunan, mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya (walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya namun tanah termasuk asset berwujud).
2. Asset tidak berwujud, yaitu asset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya misalnya surat berharga saham yang wujud fisiknya hanya secarik kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secarik kertas tersebut kita jual.

Aset Keuangan adalah asset yang tidak berwujud. Nilai dari asset ini tergantung dari nilai arus kas/uang yang akan kita terima dimasa yang akan datang, semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima dimasa yang akan datang maka semakin tinggi nilai dari asset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas/klaim atas asset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor. Berikut adalah contoh dari asset keuangan tersebut:

1. Pinjaman/kredit yang diberikan oleh bank Niaga kepada bapak Abdullah untuk renovasi rumahnya.
2. ORI atau Obligasi Ritel Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dapat dimiliki oleh setiap warga Indonesia.
3. Obligasi yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Cipta.
4. Saham biasa yang diterbitkan oleh PT. Telkomsel.



5. Saham preferen yang diterbitkan oleh IBM.

Jadi hutang bank, obligasi (baik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan), saham (baik saham biasa atau preferen) yang masing-masing memiliki cara-cara pembayaran klaim yang berbeda adalah asset keuangan. Klaim adalah hak yang harus diterima oleh pemegang asset keuangan tersebut.

1. Hutangbank : untuk hutang yang dikeluarkan oleh bank, dalam hal ini bank adalah pihak pemberi pinjaman sehingga pihak peminjam uang harus membayar bunga beserta cicilan pokok pinjaman setiap kali pembayaran (bulanan atau tahunan) selama waktu yang telah disepakati (3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya) kepada bank.
2. Obligasi baik pemerintah atau perusahaan : adalah surat berharga yang menunjukkan pengakuan atas hutang. Pihak yang mengeluarkan obligasi dalam hal ini pemerintah atau perusahaan adalah pihak yang berhutang sehingga dapat disebut sebagai emiten atau issuer atau penerbit sedangkan pihak yang memegang obligasi tersebut (tentu saja dapat memegang obligasi tersebut berarti memperolehnya dengan cara membeli) disebut investor. Hak yang diperoleh investor adalah bunga yang besarnya tetap yang akan diterima setiap periode tertentu (bulanan atau tahunan) selama usia dari obligasi tersebut, selain itu investor juga akan menerima pelunasan hutang diakhir usia obligasi tersebut (ini yang membedakan klaim hutang bank dan obligasi).
3. Saham, adalah surat berharga yang menunjukan kepemilikan artinya bahwa pemegang saham tersebut memiliki perusahaan yang besarnya tergantung dari besarnya bagian saham yang dimilikinya. Semakin besar bagian saham yang

dimiliki semakin besar pula penguasaannya terhadap perusahaan tersebut.

Resiko aset keuangan dibagi 3 yaitu meliputi:

1. Resiko daya beli (*purchasing power risk*), resiko ini ditimbulkan karena adanya inflasi, sehingga resiko ini disebut juga *inflation risk*.
2. Resiko ketidak mampuan emiten atau peminjam untuk membayar kewajibannya yang disebut dengan resiko kredit (*credit risk*) atau resiko kelalaian (*default risk*).
3. Resiko nilai tukar (*foreign exchange risk*), resiko ini timbul jika berinvestasi pada mata uang asing. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Jika nilai tukar berubah kearah negatif maka kita akan menerima uang yang lebih sedikit. Misalnya investasi pada asset yang mata uangnya dolar, maka jika rupiah menguat maka kita akan menerima rupiah yang jumlahnya lebih sedikit.

Aset Keuangan dan asset berwujud secara fisik memang berbeda, pada asset berwujud, bentuk fisiknya dapat langsung dinilai dengan uang sedangkan asset keuangan wujud fisiknya tidak dapat mencerminkan nilai dari asset keuangan tersebut. Namun demikian ada satu hal yang sama-sama dimiliki oleh kedua jenis asset tersebut yaitu arus kas yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Untuk asset berwujud misalnya kepemilikan atas kapal pesiar maka arus kas yang akan kita peroleh dimasa yang akan datang adalah pendapatan yang akan kita peroleh dari penumpang. Pendapatan ini kemudian nantinya akan digunakan untuk pembayaran biaya operasional dan utang, jika ada kelebihannya (laba) maka akan dibagikan kepada para pemegang saham. Sehingga pada akhirnya arus kas yang akan diperoleh dari asset keuangan dihasilkan dari asset berwujud.

## **BAB X**

### **KINERJA KEUANGAN**

#### **A. Konsep Kinerja Keuangan**

Masalah keuangan merupakan salah satu persoalan pokok dimana menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, maka perlu diadakan penanganan yang profesional dalam setiap kegiatan operasional untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan atau kekurangan dana yang malah akan menimbulkan kebangkrutan. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, maka perlu diadakan penilaian kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini juga akan mengevaluasi kinerja perusahaan pada tahun berjalan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Sedangkan Martono dan Harjito (2001) mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya menurut Sutrisno (2003) bahwa: Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

#### **B. Analisis Rasio**

Analisis keuangan diperlukan oleh berbagai pihak seperti para pemegang saham atau investor, kreditor dan manajer karena melalui analisis keuangan ini mereka akan mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri.

Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, maka diperlukan beberapa jenis rasio, yaitu :

## 1. Rasio Likuiditas

Menurut Syamsuddin (2002) likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva yang tersedia.

### a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

### b. *Quick Ratio* (Rasio Cepat)

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Solvabilitas

Menurut Riyanto (1998) Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).

### *Debt Ratio* (Rasio Utang)

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Jumlah Modal}} \times 100\%$$

## 3. Rasio Aktivitas

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumberdaya yang dikelolanya.

### a. *Total assets turnover* (Total perputaran aktiva)

$$\text{Total assets turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

- b. *Working capital turnover* (Perputaran modal kerja)

$$\text{Working capital turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

#### 4. Rasio Profitabilitas

Menurut Riyanto (1998) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- a. *Profit Margin*

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

- b. *Net Profit Margin*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

- c. *Earning Power*

$$\text{Earning Power} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Aktiva Bersih Usaha}} \times 100\%$$

- d. *Rate of Return on Investment (ROI)*

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

- e. *Return On Asset (ROA)*

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- f. *Return On Equity (ROE)*

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

## **C. Konsep Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan secara teratur dan di dalam interval waktu yang tertentu pula (pada umumnya dilakukan setiap akhir tahun buku).

### **1. Komponen Utama Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan rugi/laba dan laporan posisi keuangan.

#### **a. Neraca**

Secara harfiah, neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka yang ada dalam neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh perusahaan.

Menurut Sutrisno (2005), Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Selanjutnya Sundjaja (2005) mengatakan bahwa Neraca adalah laporan mengenai aktiva, hutang dan modal dari perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan Husnan (2000) mengatakan bahwa Neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kekayaan, kewajiban keuangan dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu.

#### **b. Laporan laba rugi**

Setia (2002) mengatakan bahwa Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memperlihatkan biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama suatu periode waktu. Sedangkan Soemarso (2002) mengatakan bahwa Laporan laba rugi adalah iktisar pendapatan dan beban suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

c. Laporan perubahan posisi keuangan

Laporan perubahan posisi keuangan yang sering disebut laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi mengenai berapa besar dan kemana saja dana digunakan serta dari mana sumber dana itu diambil. Dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana akan dapat menjawab pertanyaan, apa yang telah dilakukan perusahaan dengan dana yang dimilikinya. Informasi yang diperoleh dari laporan ini dapat menunjukkan apakah perusahaan sedang maju atau akan mengalami kesulitan keuangan.

## **2.Klasifikasi Aset dalam Laporan Keuangan**

a. Aktiva Lancar

Kelompok ini mencakup aset yang akan dijual atau dikonsumsi dalam jangka waktu dekat yang biasanya satu tahun. Contoh aset ini adalah kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, wesel tagih dan perlengkapan.

b. Penyertaan (investasi)

Penyertaan merupakan bentuk penyertaan jangka panjang atau dimaksudkan untuk menguasai perusahaan. Contoh investasi dalam bentuk saham atau obligasi.

c. Aktiva Tetap (*Fixed Assets*)

Aktiva tetap ialah aktiva berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih satu tahun. Contoh aset ini adalah tanah, bangunan, mesin, dan peralatan dan sumber alam.

d. Aktiva Tidak Berwujud (*intangible*)

Aktiva tidak berwujud merupakan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Aset yang masuk dalam kategori ini tidak

mempunyai wujud fisik. Contoh hak paten, hak cipta, hak merek, dan waralaba (*franchise*).

e. Utang (*Liabilities*)

Utang merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

f. Modal (*Capital*)

Modal atau disebut ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha yang ditahan (laba ditahan). Laba ditahan merupakan akumulasi keuntungan yang ditahan (tidak dibagi sebagai dividen) dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya.

g. Pendapatan (*Income*)

Pendapatan (*income*) adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban yang timbul dari penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.

h. Beban (*Expense*)

Biaya (*cost*) dan beban (*expense*) berbeda dimana biaya ialah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang/jasa. Beban merupakan biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode.

### 3. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Sawir (2005), tujuan laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah



besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

#### **4.Fungsi Laporan Keuangan**

Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan sangat dibutuhkan baik bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern, yaitu sebagai dasar pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak pemakai laporan keuangan tersebut.

Adapun fungsi laporan keuangan menurut Riyanto (2000:98) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pimpinan perusahaan
  - 1). Laporan pertanggung jawaban kepada pemilik perusahaan/pemegang saham atas kepercayaan yang diberikan kepada pimpinan/manajer perusahaan untuk mengelola perusahaan.
  - 2). Dasar atau bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana kegiatan usaha di masa mendatang.
- b. Bagi pemilik perusahaan
  - 1). Alat untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh pimpinan/manajer perusahaan.
  - 2). Dasar untuk menentukan taksiran besarnya keuntungan/deviden yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c. Kreditur, bankir dan calon kreditur berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan,

terutama perusahaan yang mengajukan permohonan kredit dan menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan.

d. Bagi pemerintah

- 1). Dasar untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang menjadi beban perusahaan.
- 2). Bahan untuk menyusun data Biro Pusat Statistik dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya akan dijadikan dasar untuk membuat perencanaan bagi negara/pemerintah.

e. Bagi karyawan

- 1). Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dan jaminan sosial lainnya.
- 2). Untuk mengetahui tingkat kelayakan bonus/tunjangan yang diterimanya dibandingkan dengan besarnya keuntungan perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## D. Pengertian Kebangkrutan

Kebangkrutan merupakan suatu hal yang selalu dihindari oleh setiap perusahaan walaupun bukan atas kemauan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi pokok dalam perusahaan. Namun perusahaan bisa dihadapkan pada situasi dimana terpaksa dinyatakan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan usahanya kembali.

Weston (2002) mengatakan bahwa :Kegagalan mempunyai dua arti, pertama sebuah perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika ia tidak dapat membayar kewajiban pada waktu jatuh tempo, meskipun aktiva total melebihi kewajibannya. Keadaan ini juga didefinisikan sebagai insolvensi teknik (*technical insolvency*). Kedua, sebuah perusahaan dinyatakan pailit, jika total kewajibannya melebihi dari kewajiban aktiva totalnya. Selanjutnya Munawir (2002) mengatakan bahwa :Kegagalan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar

kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau menyebabkan terjadinya perjanjian khusus dengan para kreditur untuk mengurangi atau menghapus hutangnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan atau kegagalan keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya dalam jangka waktu tertentu.

Penyebab kebangkrutan pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal baik yang bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat umum.

Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan adalah :

- a. Adanya manajemen yang tidak baik, tidak efisien (biaya yang besar dengan pendapatan yang tidak memadai sehingga perusahaan mengalami kerugian terus-menerus).
- b. Tidak seimbangnya antara jumlah modal perusahaan dengan jumlah hutangnya.
- c. Sumber daya keseluruhan yang tidak memadai, keterampilannya integritas dan loyalitas atau bahkan moralitasnya rendah sehingga banyak terjadi kesalahan, penyimpangan dan kecurangan-kecurangan terhadap keuangan perusahaan serta penyalahgunaan wewenang yang akibatnya sangat merugikan perusahaan.

Faktor-faktor eksternal yang bersifat umum yang dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan adalah faktor politik (perubahan struktur pemerintahan), ekonomi (terjadinya krisis ekonomi), sosial (terjadinya konflik) dan budaya serta adanya campur tangan pemerintah dimana perusahaan tersebut berada. Disamping itu penggunaan yang besar atau adanya

perkembangan teknologi produksi, informasi maupun transportasi yang tidak dapat diikuti oleh perusahaan akan mengakibatkan kerugian yang akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

#### **E. Model Analisis Diskriminan Altman (*Z score*)**

Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan. Keterbatasan analisis rasio timbul dari kenyataan bahwa metodologinya pada dasarnya bersifat *univariate* yang artinya setiap rasio diuji secara terpisah. Pengaruh kombinasi dari beberapa rasio hanya didasarkan pada pertimbangan para analis keuangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekurangan dari analisis rasio, maka perlu dikombinasikan berbagai rasio agar menjadi suatu model prediksi yang berarti. Untuk tujuan tersebut digunakan dua teknik statistik, yaitu analisis regresi dan analisis diskriminan.

Masalah umum dari klasifikasi timbul jika seorang analis mempunyai ciri-ciri pengamatan tertentu dan mengharapkan klasifikasi tersebut menjadi satu dari beberapa kategori yang ditentukan sebelumnya berdasarkan ciri-ciri tersebut. Seorang analis keuangan memiliki berbagai rasio keuangan dari suatu perusahaan dan ingin menggunakan rasio tersebut untuk mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan bangkrut atau tidak bangkrut, maka analisis diskriminan merupakan salah satu teknik statistik yang bisa digunakan untuk pengklasifikasian tersebut.

Sawir (2003:6) mengemukakan bahwa : penilaian kondisi keuangan dan prestasi perusahaan diperlukan tolak ukur. Adapun tolok ukur yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lain.

Pada pertengahan tahun 1960 Dr. Edward I Altman di New York University menggunakan analisis diskriminan

70 | KINERJA KEUANGAN PERBANKAN

dengan menyusun suatu model untuk memprediksi kebangkrutan keuangan suatu perusahaan. Dalam studinya, setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, Altman menemukan 5 rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut dari sisi keuangannya.

Lima rasio yang dimaksud adalah :

1. Rasio antara modal kerja dengan total aktiva.
2. Rasio antara laba yang ditahan dengan total aktiva.
3. Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva.
4. Rasio antara jumlah modal sendiri dengan total utang.
5. Rasio antara penjualan dengan total aktiva.

Dari kelima rasio tersebut diformulasikan sebagai berikut :

$$Z_{score} = 1,2 (X_1) + 1,4 (X_2) + 3,3 (X_3) + 0,6 (X_4) + 1 (X_5)$$

Versi ini dapat digunakan untuk perusahaan publik maupun perusahaan pribadi dan untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. *Z score* hasil kreasi Altman telah teruji keandalannya sehingga bertahan sampai sekarang. Kemudian Altman mengembangkan formulasinya dengan empat variabel. Rumus *Z score* yang telah dikembangkan Altman terdapat dalam Sawir (2001:24) adalah sebagai berikut :

$$Z_{score} = 6,56 (X_1) + 3,26 (X_2) + 6,72 (X_3) + 1,05 (X_4)$$

Dimana :

$X_1$  = Rasio modal kerja dengan total aktiva (%), yaitu untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan dengan membandingkan aktiva likuid bersih dengan total aktiva. Aktiva likuid bersih atau modal kerja

didefinisikan sebagai total aktiva lancar dikurangi total kewajiban lancar.

Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat dari pada total aktiva menyebabkan rasio ini turun.

$X_2$  = Rasio antara laba yang ditahan dengan total aktiva (%), yaitu mengukur kemampulabaan kumulatif dari perusahaan. Pada beberapa tingkat, rasio ini juga mencerminkan umur perusahaan, karena semakin muda perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk membangun laba kumulatif.

Bias yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang lebih berumur ini tidak mengherankan, karena pemberian tingkat kegagalan yang tinggi kepada perusahaan yang lebih muda merupakan hal yang wajar. Bila perusahaan mulai merugi, tentu saja nilai dari total laba ditahan mulai turun.

$X_3$  = Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva (%), yaitu mengukur kemampulabaan, yakni tingkat pengembalian dari aktiva, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai ukuran seberapa besar produktivitas penggunaan dana yang dipinjam.

$X_4$  = Rasio antara jumlah modal sendiri dengan total hutang (%), yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan modal sendiri perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang merupakan kebalikan dari rasio utang per modal sendiri (DER). Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan harga pasar perlembar sahamnya. Umumnya perusahaan-perusahaan yang gagal mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri

$X_5$  = Rasio antara penjualan dengan total aktiva (kali), yaitu mengukur tingkat volume penjualan perusahaan dengan membandingkan jumlah harta yang dimiliki.

Berdasarkan formulasi dari Dr. Edward I Altman sesuai dengan Altman 1968 seperti yang dikutip dari Foster (1986) dan White, Sondhi dan Fried (1998) dalam Lesmana dan Surjanto (2004:183), untuk melihat kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kriteria penilaian adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai *Z score* > 2,99 berarti perusahaan berada dalam kondisi yang tidak bangkrut.
2. Bila nilai *Z score* antara 1,23 – 2,99 berarti perusahaan berada dalam wilayah abu-abu atau kebangkrutan mungkin terjadi (*gray area*).
3. Bila nilai *Z score* < 1,23 berarti perusahaan berada dalam kondisi yang bangkrut.

Pada penggunaan analisis ini, Altman menyarankan agar jangka waktu yang digunakan sebagai dasar peramalan kebangkrutan suatu perusahaan sebaiknya dua tahun terakhir karena berdasarkan hasil pengamatan dan penelitiannya jangka waktu dua tahun terakhir tersebut tingkat ketepatannya dapat diandalkan.

*Z score* pertama kali dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik mengenai *Z score* adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaiman ukuran perusahaan. Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, bila *Z score* mulai turun dengan tajam, lonceng peringatan harus berdering. Atau, bila perusahaan baru saja terhindar dari kebangkrutan (*survive*), *Z score* bisa digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan.

Tujuan dari perhitungan *Z score* adalah untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin

membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak. Bila *Z score* perusahaan lebih rendah daripada yang dikehendaki manajemen, maka harus diamati laporan keuangannya untuk mencari penyebab terjadinya.

Pengamatan dimulai dengan menghitung *Z score* dari periode-periode sebelumnya dan dibandingkan dengan *score* sekarang. Memantau kecenderungan *Z score* juga akan membantu mengevaluasi kekuatan perubahan perusahaan. Model-model klasifikasi kebangkrutan yang ada, termasuk *Z score* tidaklah mutlak bisa digunakan. Kenyataannya antara model yang satu dengan model yang lain seringkali bertentangan. Model-model ini dapat menjadi peringatan berharga akan adanya kesulitan dan petunjuk-petunjuk yang berguna untuk menghindari kesulitan di masa depan. Disamping itu, model ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan lain dalam perusahaan.



## **BAGIAN IV**

# **TOPIK SPESIAL: KINERJA KEUANGAN PT. BANK BRI TBK**

## BAB XI

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat

Perkembangan yang pesat dalam dunia perbankan, menjadikan setiap bank berusaha untuk melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan untuk mempertahankan reputasi bank agar kinerja keuangannya tetap berada dalam kondisi yang sehat. Tingkat Kesehatan menjadi salah satu tolok ukur kinerja keuangan bank yang sangat penting dewasa ini, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui *performance* dan profesionalisme pengelola bank tersebut. Pengelola bank yang dimaksud di sini adalah dewan komisaris dan dewan direksi yang sangat berkepentingan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dikelolanya.

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja sewaktu itu beliau menjabat sebagai Patih Banyumas dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Pada waktu itu kegiatan bank ini hanya sebatas untuk menampung pemasukan angsuran dari para peminjam kas masjid, yang dikelola oleh Patih Aria Wirjaatmadja. Ketika itu, Patih Wirjaatmadja melihat betapa praktik rentenir sangat menjerat kalangan para guru di Purwokerto. Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Dia adalah salah seorang yang berjasa memberantas rentenir dan memperkenalkan masyarakat desa pentingnya peranan sebuah bank Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948,

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar

Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang telah dirilis oleh Bank Indonesia sejak semester 2 tahun 2005 lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai salah satu bank yang bermodal di atas Rp. 10 triliun hingga 50 triliun, atau dapat dikatakan sebagai Bank-bank Nasional. Dimana Posisi Akhir Tahun 2005, Total Aset keseluruhan dari PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar Rp. 140.04 triliun. Sedangkan penyaluran Kredit yang berfokus pada Usaha Mikro Kecil Menengah dengan BRI Unit sebagai ujung tombaknya mencapai sebesar Rp. 86.6 Triliun dengan jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 6.3 juta nasabah, sedangkan penempatan Dana Pihak Ketiga mencapai posisi sebesar Rp. 112.1 Triliun. Dan pencapaian laba rugi bersih sebesar Rp. 4.1 Triliun. Kinerja keuangan yang sangat bagus telah menjadikan PT. Bank Rakyat Indonesia mencapai berbagai penghargaan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti Bank terbaik tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dari Majalah Investor, Badan Usaha Milik Negara terbaik tahun 2014 dari Majalah SWA, Indonesia Customer Loyalty Award tahun 2015 dari Majalah SWA, The Best Company in Customer Satisfaction Strategy tahun 2013 dari majalah Frointer, Bank Terbaik tahun 2014 dari majalah Gatra, Bank dengan Predikat Sangat Bagus tahun 2014, 2015 dari Majalah Infobank, Board of Advisory for Micro Finance in The World dari PBB dan masih banyak lagi.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero) mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/ SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand

Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

## **B. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Visi BRI adalah Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi BRI yaitu:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun Sasaran Jangka Panjang BRI yang dicanangkan pada Tahun 2005 oleh Jajaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero) adalah:

1. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan keuntungan.
2. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis.
4. Menjadi salah satu bank go publik terbaik.
5. Menjadi bank yang melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.

6. Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan BRI.

### C. Jasa-Jasa Perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

#### 1. Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

##### a) Britama

Britama adalah nama produk tabungan pihak ketiga dalam mata uang rupiah (IDR) yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekwensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan. Kebijakan pasar sasaran Britama diarahkan kepada nasabah perorangan (individual), nasabah non perorangan yang meliputi perusahaan (Badan hukum/non Badan Hukum), koperasi, yayasan, badan/lembaga pemerintah, badan usaha lainnya kecuali bank.

##### b) Britama Dollar

Britama Dollar adalah tabungan pihak ketiga dalam valuta asing dan saat ini hanya dibatasi US dollar dengan penarikan dan penyetoran bebas dan dilayani diseluruh unit kerja BRI (saat ini hanya di Kantor cabangdan Kantor Cabang Pembantu).

##### c) Simpedes

Simpedes adalah merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di BRI, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta jumlah pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi. Simpedes diperuntukkan bagi penyimpan/penabung perorangan/grup/badan usaha/yayasan, kecuali bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya.

## **2. Deposito& Giro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

### **a) Depobri**

Depobri adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Depobri dapat dilayani baik di Kantor cabang, kantor cabang pembantu (dalam bentuk Rupiah, valas US Dollar, Euro, Singapore Dollar, dan Japan Yen), dan di BRI Unit hanya dalam bentuk rupiah.

Pasar sasaran produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun non perorangan. Dengan demikian Depobri dapat dibuka atas nama perorangan maupun atas nama badan. Dalam hal ini dikecualikan penempatan dana oleh LKBB, Bank (diluar BPD), Anak Perusahaan Bank, dan Dana Pensiun Bank).

Bilyet Depobri yang dikeluarkan oleh BRI merupakan tanda bukti atas simpanan deposito di BRI yang diterbitkan atas nama pembelinya, dan tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya Sertifikat Deposito maupun dipindah tangankan kepada orang lain tanpa surat kuasa dari pemilik.

Jenis Bilyet Depobri yang dijual menurut jangka waktunya terdiri jangka : 1, 2, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Ketentuan pembukaan :

- 1) Deposito BRI ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan/badan usaha.
- 2) Dapat membuka rekening diseluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan BRI Unit.
- 3) Menyerahkan copy bukti diri, NPWP dan Copy AD/ART (untuk perusahaan/ badan usaha).
- 4) Setoran awal minimum Rp. 2. 500.000

### **b) Girobri**

Pengertian Giro secara umum menurut ikhtisar Ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia jilid II penerbit Bank Indonesia, adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan menurut Buku pedoman Kerja BRI Unit Bidang Simpanan penerbit Kanpus BRI, Giro adalah simpanan dari masyarakat kepada bank yang penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan tidak dibatasi oleh jumlah maupun frekuensinya sepanjang dananya mencukupi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Giro adalah jenis simpanan yang ditatausahakan di bank dimana penyetoran maupun pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat-warkat tertentu yang dipergunakan di bank yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang lazimnya disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening koran. Untuk rekening simpanan giro disebut Girobri. Rekening giro ini dapat dilayani baik di Kanca BRI maupun di BRI Unit/PPD/PK. Khusus di BRI Unit tidak melayani dalam bentuk valas selain mata uang rupiah, demikian juga Giro dalam penatausahaan kredit rekening koran. Rekening Girobri Rupiah pihak ketiga ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun badan usaha, baik Warga negara Indonesia/ Badan Usaha Nasional maupun Warga Negara Asing/Perusahaan/Institusi Asing yang berdomisili di Indonesia.

Giro BRI yang dilayani di BRI ialah dalam bentuk rupiah dan terdiri dalam dua sektor yaitu:

- 1) Giro Pemerintah yaitu giro Kepala Desa (yang dananya berasal dari dana program bantuan



Pembangunan Desa), Giro BKKBN, Giro Depdiknas, dll.

- 2) Giro Swasta yaitu giro atas nama perorangan, badan hukum, Perusahaan, badan sosial, yayasan, Pengurus Besar Matha'ul Anwar (PB.MA), Universitas Terbuka (UT), dll.

Adapun ketentuan umum dari Girobri yaitu:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening Giro (Md. SG-01)
- 2) Menunjukkan Asli bukti diri (KTP/Paspor, SIM, dll) dan menyerahkan fotocopy bukti diri yang sah dan masih berlaku. Tanda tangan calon nasabah harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.
- 3) Menunjukkan Asli akte pendirian/Anggaran Dasar beserta perubahannya untuk calon nasabah badan usaha/Yayasan (bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUH dagang dan atau UU/PP lainnya). Dan menyerahkan fotocopynya kepada bank.
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening giro (Model SG-03) yang memuat perihal penolakan bank dan penutupan rekening giro terhadap penarikan cek/ bilyet giro kosong oleh nasabah yang bersangkutan, dll.
- 6) Mengisi dan menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan pada kartu (model KCTT-01) yang akan disimpan di bank. Terhadap penandatanganan KCTT harus dilakukan dihadapan minimal satu orang petugas bank yang berwenang dan contoh tanda tangan/data dalam KCTT harus cocok dengan bukti diri nasabah yang bersangkutan.

### **3. Jasa Bank Lainnya**

#### **a) Transfer**

Transfer yaitu kegiatan untuk melayani permintaan pengiriman uang yang dilakukan melalui bank, atas permintaan nasabah bank disuatu tempat yang ditujukan untuk kepentingan seseorang atau badan yang berdomisili dalam wilayah operasi bank yang dituju. Pelayanan transfer terdiri dari transfer masuk dan transfer keluar, melalui BRI Unit yang berperan sebagai perantara saja baik untuk pengiriman maupun pembayaran transfer sedangkan pelaksanaannya adalah kantor cabang. Adapun ketentuan umum dari transfer yaitu:

- 1) Jenis transfer yang dilayani oleh BRI Unit disesuaikan dengan pengiriman uang yang dilayani di Kantor Cabang, dengan sarana yang dipergunakan adalah : Telepon, Telex, dan Facsimile.
- 2) Nasabah dibebani biaya pengiriman yang terhadap Transfer keluar yang jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, dilimpahkan ke Kantor Cabang (Pengirim).

#### **b) Inkaso**

Inkaso adalah penagihan oleh Bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga. Dari pengertian tersebut, maka inkaso di BRI dalam hal ini ialah permintaan nasabah kepada BRI (Bank Penarik) untuk menagihkan pembayaran/ menguangkan warkat yang dimilikinya kepada Bank lain (Bank tertarik) yang berdomisili diluar wilayah kliringnya.

Inkaso keluar adalah pengiriman warkat-warkat inkaso ke Bank tertarik untuk ditagihkan. Inkaso masuk adalah penerimaan warkat-warkat inkaso dari Kanca BRI atau Bank lain untuk dilaksanakan pembayarannya atas beban nasabah yang bersangkutan. Surat berharga yang merupakan hak tagihan

yang lazim dapat digolongkan sebagai warkat inkaso adalah berupa Cek, Bilyet Giro, Wesel, Aksep/ Promes dan kwitansi yang sudah ditanda tangani serta sudah jatuh tempo. Dalam proses Inkaso terkandung adanya kuasa penagihan kepada Bank/ Pihak tertentu oleh seorang pemohon dan Bank meningkatkan diri untuk melaksanakan perintah atau kuasa penagihan itu.

c) Kliring

Kliring adalah proses perhitungan di Lembaga Kliring atas surat-surat berharga yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing bank anggota kliring tersebut. Lembaga Kliring adalah Bank Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara Kliring.

Kliring keluar adalah penerusan warkat Kliring yang diterima BRI dari nasabah dan selanjutnya diserahkan dan diperhitungkan kepada Bank lain melalui Kanca BRI Induk dilembaga Kliring. Kliring masuk adalah penerimaan warkat Kliring dari lembaga Kliring yang ditarik atas rekening nasabah pada BRI Unit melalui Kanca BRI Induk. Alat-alat lalu lintas pembayaran giral yang dapat diperhitungkan dalam kliring ditetapkan oleh Bank Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Cek
- 2) Bilyet Giro
- 3) Alat lalu lintas pembayaran giral lainnya seperti :  
Surat bukti penerimaan Transfer, Wesel bank untuk Transfer, Nota Kredit, Nota Debet.
- 4) Cek Perjalanan Pergi (Cepebri)
- 5) Money Changer, arti harfiah Money Changer adalah penukaran uang. Yang dimaksud penukaran uang disini adalah transaksi jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian dan pengambilalihan Travellers Cheque (TC). Yang dimaksud dengan jual

beli UKA adalah proses penjualan atau pembelian UKA dengan nilai lawan rupiah.

- 6) Penerimaan Setoran Titipan. Penerimaan setoran titipan di BRI dilayani dengan membuka loket penerimaan setoran tersendiri yang diberi nama payment point yaitu tempat pembayaran yang disediakan oleh bank untuk kepentingan pihak tertentu untuk menerima setoran.

## **BAB XII**

### **KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero) juga menyalurkan kredit kepada masyarakat umum. Didalam penyaluran kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero) mempunyai strategi bisnis baik untuk umum maupun kepada karyawan Bank Rakyat Indonesia sendiri dengan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik peraturan atau ketentuan intern maupun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk kredit yang diberikan pada umumnya di jamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggung jawab (SKMHT) atau surat kuasa untuk menjual (Fiducia), deposito berjangka, atau jaminan lainnya yang dapat diterima oleh Bank Rakyat Indonesia. Adapun jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja, adalah kredit yang diberikan kepada usaha yang berbadan hukum, maupun kepada usaha perorangan untuk menambah modal kerja dalam peningkatan usahanya. Kredit modal kerja ini pada umumnya mempunyai jangka waktu tidak terlalu lama yaitu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang kembali sepanjang usaha debitur layak dibiayai.
2. Kredit Investasi, kredit ini diberikan kepada usaha perorangan atau yang telah berbadan hukum untuk penyediaan investasi seperti: mesin-mesin, kendaraan, gedung, dan lainnya yang termasuk investasi.
3. Kredit Ekspor, kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang ekspor untuk

pembiayaan barang-barang yang akan dijual keluar negeri dengan melalui Letter Of Kredit (LC).

4. Kredit Konsumsi, kredit ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan keperluan konsumtif seperti: Perumahan, kendaraan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
5. Kredit Program, kredit ini diberikan kepada usaha perorangan atau yang telah berbadan hukum untuk membiayai program pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja permanen, dan kredit modal kerja dimana pemerintah dapat menyediakan sebagian dan atau keseluruhan dananya.
6. Kredit Sindikasi, kredit yang merupakan kredit yang diberikan kepada seluruh debitur melalui perjanjian, pembiayaan bersama dengan bank-bank lain
7. Kredit Karyawan, kredit yang diberikan kepada karyawan Bank Rakyat Indonesia terdiri dari kredit dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor dan rumah dengan jangka waktu satu sampai lima belas tahun, yang dibayar melalui pemotongan gaji karyawan setiap bulan.

Pertumbuhan Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero) masih didominasi oleh kredit pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memang adalah andalan utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar (Persero), tiap bulannya mengucurkan dana Rp. 1.3 Triliun untuk sektor Kredit UMKM. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) saat ini sebesar 77.83 %, dan pertumbuhan kredit dan simpanan sebesar 89.89 %.

## **BAB XIII**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS**

Efektivitas kinerja perusahaan hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang secara jelas dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan perusahaan. Struktur organisasi haruslah menguntungkan jika ditinjau dari ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan atau pergeseran di dalam perusahaan tidak membawa pengaruh secara serius.

Suatu kriteria yang penting dalam mengukur kebaikan struktur organisasi adalah sejauhmana organisasi itu mengadakan kedudukan yang bebas berdiri sendiri antara departemen-departemen dalam organisasi itu dan semua departemen haruslah bekerja sama dengan harmonis.

Salah satu persyaratan yang cukup penting bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan, yaitu apabila terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab harus dinyatakan dengan jelas dan juga salah satu syarat untuk mendorong kerja sama yang baik untuk meningkatkan produktivitas karyawan serta keinginan untuk melakukan sesuatu dengan sempurna sehingga dapat memperlancar pekerjaan dalam perusahaan. Hal ini penting karena tanpa adanya struktur organisasi yang mantap akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan kata lain garis komando dalam struktur organisasi haruslah digambarkan secara jelas agar setiap bagian dapat mengkoordinir bagiannya masing-masing dengan baik. Melalui struktur organisasi dapat dilihat garis tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pada seseorang yang

telah bekerja pada perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat mencegah adanya kesimpangsiuran dari pada tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diemban oleh seorang karyawan.

Berikut ini akan dipaparkan tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian.

#### **A. Pemimpin Kantor Cabang**

Pimpinan kantor cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negoisasi, merevisi dan mengupayakan pencapaian RKA.
2. Mempersiapkan dan menjamin kelancaran pelayanan operasional di kantor cabang (kanca), kanca pembantu (Kancapem) dan BRI Unit.
3. Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai kanca, kancapem dan BRI unit untuk meningkatkan kualitas setiap fungsi seperti :fungsi marketing, operasional, dan support.
4. Menjamin KUP dan PPK dilaksanakan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan resiko sekecil-kecilnya serta menciptakan pelayanan yang prima.
5. Menjamin seluruh transaksi yang disetujui/disahkan telah sesuai dengan kewenangannya.
6. Mengelola dan mengawasi kebutuhan logistik secara efisien
7. Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan
8. Melakukakan pembinaan dan hubungan dengan nasabah penyimpan dan peminjam kanca,



- kancapem dan BRI Unit baik nasabah kerjasama maupun individual.
9. Mengembangkan bisnis perkreditan di kanca, kancapem, dan BRI unit guna memperoleh keuntungan / penghasilan yang optimal dengan resiko yang dapat diterima dan tetap mempertahankan kualitas portofolio yang sehat.
  10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. Manajer Pemasaran**

Manajer pemasaran mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi di Wilayah kerjanya, sehingga dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), kriteria Nasabah yang dapat diterima (KND) dan rencana pemasaran tahunan (RPT) Kanca
2. Menerapkan proses kredit sesuai dengan kebijakan umum perkreditan(KUP) BRI dan pedoman pelaksanaan krediot (PPK) retail yang telah ditetapkan terhadap Account yang termasuk portofolionya untuk mencapai target kanca.
3. Menjamin KUP dan PPK dilaksanakan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan resiko sekecil-kecilnya serta menciptakan pelayanan yang prima.
4. Berperan secara aktif dalam strategi pengembangan bisnis dan pelayanan kanca, serta menjalin hubungan secara profesional dengan debitur dan pihak ketiga yang terkait dengan BRI.
5. Melaporkan masalah-masalah kredit kepada pinca.
6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit yang menjadi tanggungjawabnya

- mulai kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.
7. Melakukan kegiatan pemasaran kredit, dana dan jasa
  8. Berperan aktif dalam pembinaan peningkatan keterampilan, kemampuan dan sikap perilaku bawahan.
  9. Melakukan pembinaan (termasuk penilaian kinerja) kepada pegawai bawahannya.
  10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pinca.

### **C. *Account Officer* Komersial**

*Account officer* komersial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi tanggungjawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya (pendapatan/keuntungan) dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang dikelolanya.
2. Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kanca
3. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah
4. Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
5. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit sebelum diputus
6. Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan kredit yang menjadi yang menjadi tanggungjawabnya mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit dilunasi.

7. Melaporkan situasi dan kondisi debitur yang masih lancar maupun memburuk serta memberikan usul, saran dan pemecahan atau penanggulangannya kepada atasan.
8. Membuat usulan kepada manajer pemasaran dan atau pinca untuk mengklasifikasikan pinjaman-pinjaman yang memburuk.
9. Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian Kredit bermasalah
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh manajer pemasarab dan atau pinca.

#### ***D. Funding Officer***

Funding officer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh pemimpin cabang untuknya
2. Menyusun rencana kerja tiga bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan untuknya oleh pinca atau menejer pemasaran
3. Menyusun rencana kerja bulanan, sebagai rincian dari rencana kerja tiga bulanan, untuk mengevaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap akhir bulan.
4. Membuat rencana kunjungan mingguan, yang menuju kepada tercapainya target penjualan mingguan, bulanan, kwartal dan tahunan.
5. Melakukan kegiatan pemasaran produk dan dan jasa dengan Cross selling
6. Menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sekerja untuk membangun kerjasama yang mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada nasabah
7. Melaporkan kepada pinca atas hasil-hasil pencapaiannya.

8. Mencapai target yang telah ditentukan
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasannya.

#### **E. Manajer Operasional**

Manajer operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa pengelolaan kas kanca, dan surat-surat berharga telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan sudah ditindaklanjuti dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan setiap pelaksanaan administrasi kredit telah berjalan sesuai ketentuan
4. Memastikan bahwa setiap transaksi pembukuan tunai, kliring dan pemindahbukuan sesuai dengan wewenangnya telah disahkan
5. Memastikan semua laporan untuk kepentingan interen dan eksteran telah dibuat dan dikirim tepat waktu
6. Membina dan menilai kinerja pegawai yang menjadi bawahannya
7. Menindaklanjuti semua temuan audit
8. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pinca.

#### **F. Asisten Manajer Operasional**

Asisten Manajer Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

1. Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya.

2. Melaksanakan tambahan kas awal hari/selama jam pelayanan kas bagi supervisor/teller (bagi kanca yang tidak ada supervisor) dan ATM serta menerima setoran kas dari teller/supervisor
3. Mendistribusikan nomor kupon undian tabungan kanca pada OLSIB
4. Memastikan kebenaran pembuatan/penerimaan dokumen/nota yang berkaitan dengan pelayanan dana dan jasa (termasuk devisa)
5. Memastikan kebenaran pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawabnya
6. Membina dan menilai performance pegawai yang berada dibawahnya.
7. Mencocokkan saldo penjualan CEPEBRI yang belum dicairkan dengan neraca dan menindaklanjuti bila terdapat ketidakcocokan.
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **G. Supervisor Administrasi Kredit (ADK)**

Supervisor ADK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di kantor Cabang
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTK terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit
3. Menginformasikan kredit-kredit yang akan jatuh tempo 3 bulan yang akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit
4. Membantu melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab komite kebijaksanaan perkreditan (KKP) ditingkat kanca.
5. Memastikan bahwa asuransi kredit, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan

- kredit telah dikelola/diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menginformasikan kepada pejabat kredit lini tentang dokumen –dokumen kredit yang telah jatuh tempo (expired) untuk segera diperbaharui/diperpanjang
  7. Memastikan bahwa instruksi pencairan kredit telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Membina dan menilai kinerja semua personil yang menjadi bawahannya.
  9. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **H. Supervisor Pelayanan Kas**

Supervisor pelayanan kas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan kuitansi tambahan kas Supervisor dan ATM serta menerima uang dari AMO
2. Menyetujui tambahan kas awal teller, membuka dan mendistribukan uangnya kepada teller
3. Mengisi kas ATM bersama petugas yang ditunjuk
4. Menerima kuitansi tambahan kas atau setoran kas beserta uangnya dari kanca Pembantu dan BRI unit yang diterima di kanca
5. Meneliti bukti kas yang diterima
6. Membuka kas teller pada akhir hari dan melakukan opname kas
7. Membuat tanda setoran dan menyerahkan fisik uang ke AMO
8. Melaksanakan verifikasi awal atas semua transaksi teller
9. Menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang (PU) sesuai dengan kewenangannya.

10. Memastikan kebenaran pengelolaan kuitansi pembayaran rekening listrik/telepon/PAM/PBB yang dilaksanakan Teller/petugas Payment Point
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasannya.

#### **I. Teller**

Teller mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi tambahan kas dan menerima uang dari Supervisor/AMO
2. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya
3. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima termasuk kelengkapan MCS sebelum dibayarkan kepada berhak.
4. Mengelola dan menyetorkan uang fisik kas kepada Supervisor baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari.
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan instruksi dari atasan

#### **J. Tim Kurir Kas (TKK)**

Tim kurir Kas bertanggung jawab langsung kepada Supervisor pelayanan atau kepada Asisten Manajer Operasional dalam hal ini tidak ada formasi supervisor pelayanan.

#### **K. Payment Point**

Payment Point mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola pembayaran rekening listrik /telepon/PAM/PBB (selama jam pelayanan) dan menerima pembayaran dari pelanggan untuk memastikan keamanannya.

2. Menerima setoran uang untuk Payment Point dan memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti setoran dan dokumen pendukungnya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang diterima.
3. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasannya dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasional kanca.

#### **L. Supervisor Pelayanan Administrasi Dana Jasa**

Supervisor pelayanan administrasi dana jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas semua kegiatan pelayanan dana, jasa (termasuk rekening kerja sama serta devisa) dan pinjaman yang dilakukan oleh petugas Administrasi Dana dan jasa
2. Mengaktifkan pembukaan rekening simpanan
3. Meyakinkan kebenaran bukti pembukuan dengan dokumen sumber dan melakukan pengecekan atas semua transaksi pemindahbukuan pada bidang dana dan jasa bank.
4. Memastikan perhitungan penalti bunga deposito dilakukan dengan benar.
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasannya.

#### **M. Unit Pelayanan Nasabah (UPN)**

UPN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada calon nasabah/nasabah mengenai produk dana dan jasa BRI
2. Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan .



3. Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ketempat tinggal/ usaha nasabah)
4. Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang
5. Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI

#### **N. Petugas Kliring**

Petugas Kliring mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meng-encode warkat Kliring keluar
2. Menyiapkan dokumen kliring penyerahan
3. Membawa warkat ke/dari lembaga kliring
4. Meneliti kembali hasil kliring/neraca kliring dari BI dengan data kliring penyerahan hasil sebelumnya.
5. Menyiapkan nota pembukuan/dokumen hasil kalah atau menang kliring.

#### **O. Supervisor Pelayanan Interen**

Pelayanan Interen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa tugas-tugas dibidang personalia, logistik dan keamanan di kanca telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengadministrasikan semua jenis barang di Kanca lain (dahulu Spoke) dan menyiapkan perhitungan dan bukti pembukuannya.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## **P. Sekertariat/SDM**

Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengagendakan surat-surat keluar dan surat-surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengatur lalulintas pembicaraan melalui telepon
3. Mendistribusikan semua surat-surat masuk kepada pejabat-pejabat yang berwenang di kanca
4. Mengatur agenda kerja pinca
5. Melayani tamu-tamu yang akan bertemu dengan pinca
6. Menyiapkan konsep dan mengetik surat-surat sesuai perintah pinca.

## BAB XIV

### METODE

Kajian penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja Keuangan adalah penilaian hasil kerja suatu perusahaan pada bidang keuangan pada suatu periode tertentu (2013-2016) dengan menggunakan rasio-rasio keuangan pada neraca dan laporan laba rugi. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama empat tahun terakhir (2013-2016) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah neraca dan laporan laba/rugi selama empat tahun terakhir (2013-2016) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar.

Untuk memperoleh data dan informasi sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode/teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kajian pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada pustaka dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen atau data-data yang ada pada perusahaan serta literatur-literatur lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan cara :
  - a). Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan

Kepala Cabang/staf PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar yang dianggap mengetahui hal-hal yang akan diteliti.

- b). Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen, laporan dan catatan-catatan tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Data atau informasi yang diperoleh dari perusahaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan, meliputi beberapa rasio yang berhubungan dengan analisis diskriminan Altman (*Z score*) yaitu:

1. Rasio antara modal kerja dengan total aktiva ( $X_1$ )

$$X_1 = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Rasio antara laba ditahan dengan total aktiva ( $X_2$ )

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva ( $X_3$ )

$$X_3 = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Rasio antara jumlah modal sendiri dengan jumlah hutang ( $X_4$ )

$$X_4 = \frac{\text{Jumlah Modal Sendiri}}{\text{Jumlah Hutang}}$$

5. Rasio antara penjualan dengan total aktiva ( $X_5$ )

$$X_5 = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$Z_{score} = 1,2 (X_1) + 1,4 (X_2) + 3,3 (X_3) + 0,6 (X_4) + 1 (X_5)$$

Dimana :

- a.  $Z_{score} > 2,99$  berarti tidak bangkrut.

- b. *Z score* antara 1,23 – 2,99 berarti kebangkrutan mungkin terjadi.
- c. *Z score* < 1,23 berarti bangkrut.

## BAB XV

### ANALISIS DISKRIMINAN ALTMAN (*Z SCORE*)

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat kebangkrutan atau kesulitan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar dengan memperhatikan beberapa rasio keuangan yang dianggap paling berpengaruh dalam kesulitan keuangan.

#### A. Analisis *Z score* pada tahun 2014

Hasil analisis terhadap data menunjukkan bahwa *Z score* PT. bank Rakyat Indoneia Tbk adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio antara modal kerja dengan total aktiva ( $X_1$ )

$$X_1 = \frac{457.015.807.017,14 - 7.950.317.336,47}{466.574.883.457,29} \\ = 0,96$$

- 2) Rasio antara laba ditahan dengan total aktiva ( $X_2$ )

$$X_2 = \frac{18.403.878.592,57}{466.574.883.457,29} \\ = 0,04$$

- 3) Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva ( $X_3$ )

$$X_3 = \frac{18.403.878.592,57}{466.574.883.457,29} \\ = 0,04$$

- 4) Rasio antara jumlah modal sendiri dengan jumlah hutang ( $X_4$ )

$$X_4 = \frac{18.403.878.992,57}{55.879.655.303.66} \\ = 0,32$$

- 5) Rasio antara penjualan dengan total aktiva( $X_5$ )

$$X_5 = \frac{77.065.510.894,24}{466.574.883.457,29}$$

$$= 0,17$$

$$Z_{score} = 1,2 (0,96) + 1,4 (0,04) + 3,3(0,04) + 0,6 (0,04) + 1 (0,17)$$

$$= 1,15 + 0,06 + 0,13 + 0,2 + 0,17$$

$$= 1,71$$

## B. Analisis *Z score* pada tahun 2015

Hasil analisis terhadap data menunjukkan bahwa *Z score* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio antara modal kerja dengan total aktiva ( $X_1$ )

$$X_1 = \frac{592.428.587.694,15 - 565.288.147.531,79}{603.472.181.964,51}$$

$$= 0,04$$

- 2) Rasio antara laba ditahan dengan total aktiva ( $X_2$ )

$$X_2 = \frac{15.463.942.941,25}{603.472.181.964,51}$$

$$= 0,03$$

- 3) Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva ( $X_3$ )

$$X_3 = \frac{15.463.942.941,25}{603.472.181.964,51}$$

$$= 0,03$$

- 4) Rasio antara jumlah modal sendiri dengan jumlah hutang ( $X_4$ )

$$X_4 = \frac{30.078.898.216,01}{15.907.803.070,98}$$

$$= 1,89$$

- 5) Rasio antara penjualan dengan total aktiva( $X_5$ )

$$X_5 = \frac{45.362.924.310,12}{565.288.147.531,79}$$
$$= 0,08$$

$$Z_{score} = 1,2 (0,04) + 1,4 (0,03) + 3,3 (0,03) + 0,6 (1,89) + 1 (0,08)$$
$$= 0,05 + 0,04 + 0,10 + 1,13 + 0,08$$
$$= 1,40$$

### C. Analisis *Z score* pada tahun 2016

Hasil analisis terhadap data menunjukkan bahwa *Z score* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio antara modal kerja dengan total aktiva ( $X_1$ )

$$X_1 = \frac{1.063.164.814.181,23 - 627.462.814.898,75}{1.074.614.284.301,23}$$
$$= 0,41$$

- 2) Rasio antara laba ditahan dengan total aktiva ( $X_2$ )

$$X_2 = \frac{33.663.200.027,71}{1.074.614.284.301,23}$$
$$= 0,03$$

- 3) Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva ( $X_3$ )

$$X_3 = \frac{33.663.200.027,71}{1.074.614.284.301,23}$$
$$= 0,03$$

- 4) Rasio antara jumlah modal sendiri dengan jumlah hutang ( $X_4$ )



$$X_4 = \frac{33.663.200.027,71}{18.466.258.172,79}$$

$$= 1,82$$

5) Rasio antara penjualan dengan total aktiva( $X_5$ )

$$X_5 = \frac{108.860.986.398,14}{1.074.614.287.301,23}$$

$$= 0,1$$

$$Z_{score} = 1,2 (0,41) + 1,4 (0,03) + 3,3 (0,03) + 0,6 (1,82) + 1 (0,1)$$

$$= 0,5 + 0,04 + 0,10 + 1,1 + 0,1$$

$$= 1,83$$

Tabel 2. Hasil Analisis *Z score* Konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dalam rupiah.

eterangan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
$X_1$	0,96	0,04	0,41
$X_2$	0,04	0,03	0,03
$X_3$	0,04	0,03	0,03
$X_4$	0,033	1,89	1,82
$X_5$	0,17	0,08	0,1
<b><i>Z score</i></b>	<b>1,71</b>	<b>1,4</b>	<b>1,83</b>

Sumber : Data telah diolah 2017.

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2014  $X_1$  sebesar 0,96,  $X_2$  sebesar 0,04  $X_3$  sebesar 0,04  $X_4$  sebesar 0,033 dan  $X_5$  sebesar 0,17 sedangkan pada tahun 2015  $X_1$  sebesar 0,04  $X_2$  sebesar 0,03  $X_3$  sebesar 0,03  $X_4$  sebesar 1,89 dan  $X_5$  sebesar

0,08 dan pada tahun 2006  $X_1$  sebesar 0,41  $X_2$  sebesar 0,03  $X_3$  sebesar 0,03  $X_4$  sebesar 1,82 dan  $X_5$  sebesar 0,1

#### D. Kajian

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kecil tingkat kebangkrutan PT. bank Rakyat Indonesia Tbk selama tiga tahun terakhir (2014-2016) dengan menggunakan alat analisis diskriminan Altman atau metode *Z score*.

Analisis diskriminan atau *Z score* yang ditentukan dari hitungan standar dikalikan rasio-rasio keuangan tertentu yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Hasil perkalian dari rasio-rasio keuangan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$X_1$  = Rp 0,04 artinya setiap Rp 1 modal kerja dapat dijamin oleh aktiva sebesar Rp 0,04.

$X_2$  = Rp 0,03 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba ditahan sebesar Rp 0,03

$X_3$  = Rp 0,03 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp 0,03.

$X_4$  = Rp 0,033 artinya setiap Rp 1 hutang dapat dijamin oleh modal sendiri sebesar Rp 0,033.

$X_5$  = Rp 0,17 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba dari setiap kali penjualan sebesar Rp 0,17.

Berdasarkan nilai di atas, maka *Z score* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar pada tahun 2014 adalah sebesar 1,71 ini berada pada kriteria  $Z > 1,23$  yang artinya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berada pada keadaan yang ragu-ragu sehat.

Selanjutnya hasil perkalian dari rasio-rasio keuangan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- X1 = Rp 0,092 artinya setiap Rp 0,092 modal kerja dapat dijamin oleh aktiva sebesar Rp 1.
- X2 = Rp 0,042 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba ditahan sebesar Rp 0,042
- X3 = Rp 0,165 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp 0,165.
- X4 = Rp 1,89 artinya setiap Rp 1 hutang dapat dijamin oleh modal sendiri sebesar Rp 1,89.
- X5 = Rp 0.08 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba dari setiap kali penjualan sebesar Rp 0.08

Berdasarkan nilai di atas, maka *Z score* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar pada tahun 2005 adalah sebesar 1,4 ini berada pada kriteria  $Z > 1,23$  yang artinya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berada pada keadaan yang ragu-ragu sehat

Selanjutnya hasil perkalian dari rasio-rasio keuangan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- X1 = Rp 0,41 artinya setiap Rp 0,41 modal kerja dapat dijamin oleh aktiva sebesar Rp 1.
- X2 = Rp 0,03 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba ditahan sebesar Rp 0,03
- X3 = Rp 0,03 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp 0,03.

X4 = Rp 1,82 artinya setiap Rp 1 hutang dapat dijamin oleh modal sendiri sebesar Rp 1,82.

X5 = Rp 0.14 artinya setiap Rp 1 aktiva yang digunakan mampu menghasilkan laba dari setiap kali penjualan sebesar Rp 0.14

Berdasarkan nilai di atas, maka *Z score* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar pada tahun 2016 adalah sebesar 1,83 ini berada pada kriteria  $Z > 1,23$  yang artinya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berada pada keadaan yang ragu-ragu sehat.

Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan sebelumnya yang menyakatan Kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar aman dari risiko kebangkrutan dengan menggunakan analisis diskriminan Altman (*Z score*) ditolak, karena hasilnya ternyata adalah Ragu-ragu (Gray Area).

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Akhir**

Hasil skor melalui analisis diskriminan Altman (*Z score*) menjelaskan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) menunjukkan kinerja keuangan secara umum dalam keadaan *gray area* atau abu-abu yang dapat dikategori sebagai kondisi untuk berhati-hati karena skor yang dicapai berada pada kriteria  $Z = 1,23-2,99$ .

Implikasi dari kajian ini adalah pada aspek keuangan khususnya kinerja keuangan, perusahaan hendaknya lebih meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usahanya sehingga kinerja keuangan untuk masa yang akan datang bisa lebih meningkat. Berdasarkan analisis diskriminan Altman (*Z score*) tiga tahun terakhir (2014-2016), perusahaan hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya supaya bisa terhindar dari resiko kebangkrutan.

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi semua kehidupan baik manusia maupun bagi perusahaan. Dengan kondisi yang sehat maka semua pekerjaan akan berjalan dengan lancar, kesehatan bisa meningkatkan gairah bekerja dan meningkatkan kemampuan lainnya. Hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan, sama halnya dengan suatu perbankan juga harus tetap menjaga kesehatannya agar tetap prima dalam melayani nasabah, bukan hanya tetap prima dalam melayani nasabah saja akan tetapi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah/ masyarakat terhadap perbankan.

Bukan hanya pemilik bank dan OJK/Bank Indonesia saja yang membutuhkan penilaian kesehatan bank akan tetapi masyarakat juga membutuhkan penilaian kesehatan bank. Dengan kata lain bank yang sehat bank yang dapat menjaga dan

memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Kondisi bank yang tidak sehat tidak hanya membahayakan bank itu sendiri melainkan juga membahayakan pihak lain seperti bank lain yang bekerja sama dengan bank itu sendiri dan pihak masyarakat atau nasabah.

Penilaian kesehatan bank ini sangat penting dikarenakan masyarakat sudah memberikan kepercayaannya kepada bank untuk mengelola dana atau uangnya. Bank yang dinyatakan sehat justru sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan pamornya dimata para nasabahnya atau calon nasabahnya.

Secara umum bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi bank dapat dikelompokkan tiga (Suseno dan Piter Abdullah: 2003), yaitu: (1) fungsi intermediasi yang menjembatani pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana; (2) memberikan pelayanan dalam lalulintas sistem pembayarani Selain itu bank juga merupakan (3) media mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral.

Bank akan dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam perekonomian jika bank tersebut sehat. Jika bank tidak sehat maka: (1) fungsi intermediasi terganggu, akibatnya alokasi dan penyediaan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi terbatas, (2) lalulintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar, dan (3) efektifitas kebijakan moneter terganggu.

Stabilitas sitem perbankan sebagai bagian dari stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu perekonomian. Bahkan kajian yang dilakukan Lindgren (1996) menunjukkan banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya sistem perbankan . Karena

pentingnya kesehatan bank bagi perekonomian maka tulisan ini membahas bagaimana mengukur tingkat kesehatan bank di Indonesia. Tulisan ini tidak bertujuan untuk memberikan kemampuan lengkap bagi pembaca sehingga dapat mengukur tingkat kesehatan bank. Tulisan ini bertujuan memberikan wawasan kepada pembaca bagaimana cara dan komponen apa yang dinilai untuk menyusun kriteria kesehatan suatu bank.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko, bank perlu mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara

lain dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “*reward system*” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya.

Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank.

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. Bank akan dilikuidasi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat parah atau benar-benar tidak sehat.



## **B. Masa Depan Industri Perbankan di Era Digital**

*Digital economy* merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet sebagai medianya dalam berbagai kegiatan baik berkomunikasi, kolaborasi, maupun bekerjasama antar perusahaan ataupun individu yang dapat mendatangkan profit dalam perekonomian. Kegiatan tersebut dapat meliputi berbagai area yang luas, termasuk untuk jasa bisnis perbankan. Dengan keberadaan digital ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dan jasa, baik di level mikro maupun makro.

Pertumbuhan era ekonomi digital bisa dibilang sangat cepat. Semua transaksi akan menggunakan basis teknologi, dan semakin banyaknya variasi model bisnis ekonomi digital yang berkembang untuk mendorong terciptanya pembagian ekonomi diantara pelaku bisnis. Perbankan pun bergerak maju dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi agar masyarakat dapat membuktikan serta merasakan bahwa bertransaksi dengan bantuan teknologi itu mudah. Sehingga persaingan antar bank dan institusi keuangan sudah memasuki babak baru dalam teknologi aplikasi yang merupakan Implikasi perkembangan bisnis perbankan terhadap era *digital economy*.

Teknologi aplikasi dalam perbankan dinamakan dengan digital banking yang merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah demi mewujudkan ekonomi digital seperti yang dicita-citakan. Digital banking yang telah berkembang sampai saat ini yaitu seperti ATM, internet banking, mobile banking, video banking, phone banking, dan SMS banking. Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) sesuai dengan kebijakan OJK yang utamanya ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

Namun, sampai saat ini di Indonesia masih ada berbagai hambatan yang membuat perkembangan digital ekonomi terhambat, diantaranya kurangnya infrastruktur jaringan yang

kurang luas sehingga belum dapat diakses semua orang. Hambatan kedua ialah kurangnya minat masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi digital. Baru sekitar 35 persen masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi digital keuangan. Ketiga, kontribusi bisnis di sektor digital masih minim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasi hal tersebut ada 5 langkah yang bisa di tempuh untuk mengembangkan digital ekonomi Indonesia. Pertama, pengalaman konsumen, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya.

Sebab, konsumen di dunia digital sangat mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain. Kedua, *cyber security*, yaitu pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan. Ketiga, menghubungkan online dengan offline. Gryseels mencontohkan, suatu perusahaan penjual barang harus menyiapkan tempat bagi konsumen untuk mengambil barangnya secara offline. Hal tersebut mengacu pada data 50 persen pelanggan di Amerika Serikat lebih suka mengambil barang yang membelinya secara langsung, walaupun membelanjanya secara online. Keempat, perusahaan juga harus menggunakan analisis berbasis data untuk menentukan kebutuhan, perilaku, dan keinginan konsumen. Kelima, berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi yang mendukung digitalisasi.

Dengan adanya *digital economy* diharapkan bank dapat mempermudah dalam menyimpan dan menganalisa data nasabah. Sehingga dapat membantu bank untuk menjaga hubungan dengan konsumen, mengatasi keluhan konsumen dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat dengan lebih cepat, murah, jelas dan transparan bagi konsumen. Bank lebih efisien karena tidak lagi berinvestasi di kantor cabang serta nasabah tidak perlu repot-

repot ke kantor cabang misalnya untuk transfer uang ke keluarga yang berbeda daerah.

Namun dengan begitu ada beberapa tantangan digital ekonomi terhadap perkembangan bisnis perbankan yaitu seperti pada bagian keamanan atau sekuriti, dengan semakin canggihnya teknologi keamanan seiring pula dengan makin canggihnya teknologi pencurian di ranah digital. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau phising. Phising merupakan pencurian data penting milik orang lain seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon yang dipergunakan untuk membobol akun nasabah.

Perbankan sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran dana di suatu negara haruslah berkembang dan mengikuti kebutuhan pasar. Perbankan harus selalu menjadi pilihan utama individu dalam melakukan kegiatan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut, perbankan haruslah melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah nasabah untuk melakukan segala kegiatan ekonominya.

Di zaman digital saat ini teknologi berkembang sangat pesat dan cepat. Dengan berkembangnya teknologi ini membuat berbagai sektor kehidupan melakukan inovasi dan juga penyesuaian untuk mempermudah manusia. Dengan sentuhan jari saja di smartphone, kini setiap orang bisa melakukan apapun dengan sangat mudah bahkan melakukan hal hal yang dulu dianggap tabu dan tidak mungkin, saat ini semua menjadi sangat mungkin karena adanya perkembangan digital yang luar biasa.

Perkembangan digital telah menyentuh seluruh aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi perbankan. Dengan berkembangnya digital ekonomi memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan perbankannya tanpa harus datang ke kantor bank terkait. Melihat mundur kebelakang, dahulu sektor perbankan mengharuskan setiap nasabahnya untuk datang langsung ke kantor cabang untuk setiap transaksi. Mulai dari

melakukan setoran tunai hingga tarikan tunai, semua itu dilakukan dengan manual dan mengharuskan setiap nasabah untuk datang dan berlama lama antri untuk dapat melakukan transaksinya. Seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, manusia akan melakukan berbagai cara untuk menghemat waktunya di era globalisasi ini.

Penemuan yang luar biasa dari perbankan ialah ditemukannya *ATM (Automatic Teller Machine)*, penemuan ini membuat setiap nasabah yang ingin melakukan tarikan tunai untuk tidak harus datang ke teller dan menunggu berlama lama. Saat ini, *ATM* tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transaksi nasabah untuk melakukan tarikan tunai. Anda bisa melakukan transaksi pembayaran, transfer di mesin ini. Bahkan saat ini sudah ada ribuan *ATM* yang dapat melakukan setoran tunai yang semakin memudahkan nasabah untuk melakukan setiap transaksi. Hal ini membuat perbankan di Indonesia tidak terlalu gencar melakukan perluasan jaringan dengan membuka kantor cabang. Berdasarkan informasi dari Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum per Juli 2017 tercatat sebanyak 32.659 unit kantor. Jumlah tersebut menyusut 0,3 persen dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama pada tahun lalu yakni sebanyak 32.772 unit kantor.

Sementara itu perkembangan mesin *ATM* di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini terbilang fluktuatif dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang. Sementara itu, menurut data Bank Indonesia (BI), jumlah mesin *ATM* juga hanya tumbuh tipis. Terhitung Juli 2017, jumlah *ATM* yang tersebar sebanyak 103.953 unit mesin, jumlah ini hanya bertambah 0,51 persen dibandingkan posisi pada akhir tahun lalu .

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga keunggulan *smartphone* yang makin berkembang, perbankan mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi itu pula. Langkah pertama yang dilakukan perbankan untuk mengimbangi perkembangan teknologi ialah dengan mengeluarkan jasa *sms banking*. Meskipun terdengar kuno,

fasilitas dari perbankan ini sempat menjadi salah satu solusi untuk mengirim uang dan melakukan pembayaran di wilayah yang jauh dari mesin atm.

Selain itu ada internet banking yang memudahkan para nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari pencairan saldo hingga membayar tagihan bulanan. Dengan internet banking anda bisa melakukan berbagai transaksi perbankan di berbagai penjuru dunia tanpa terikat waktu dan hanya membutuhkan koneksi internet. Setelah smartphone semakin mudah untuk dimiliki, berbagai bank mulai merilis aplikasi m-banking. Dibandingkan dengan sms banking dan juga internet banking, mbanking lebih diminati para nasabah. Mereka bisa menggunakan fasilitas mbanking dengan sangat mudah untuk menyelesaikan segala transaksi perbankan.

Perkembangan pengguna e banking di Indonesia sendiri cukup pesat. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan secara data dan pengguna e-banking cukup meyakinkan. Di mana jumlah pengguna e-banking (*SMS banking, phonebanking, mobile banking, dan internet banking*) meningkat menjadi 270 persen, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 meningkat menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Sementara jumlah transaksi pengguna e-banking meningkat 169 persen, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Perkembangan perbankan 3 hingga 5 tahun terakhir ini memang didominasi oleh perkembangan teknologi perbankan menyusul perkembangan digital ekonomi, perbankan semakin memajukan para nasabahnya dengan melakukan berbagai inovasi agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus kehilangan waktu berlebih.

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat dan gesit jangan dijadikan sebuah ancaman dan hambatan, melainkan dijadikan sebagai tantangan dan pemicu untuk berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang akan membantu pekerjaan manusia lebih teratur dan terarah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Hal ini dibuktikan dengan survei yang

dilakukan oleh perusahaan riset "*We Are Social*", mereka merilis data yang menunjukkan pengguna internet di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia pada awal tahun 2016 pengguna internet berjumlah 88,1 juta jiwa dan bertambah sebesar 51 persen menjadi 132, 7 juta jiwa. 69 persen diantara pengguna internet tersebut mengakses internet menggunakan handphone genggam mereka. Dengan jumlah yang sangat besar ini, peluang usaha di dunia digital akan semakin berkembang termasuk dunia usaha perbankan di era digital ekonomi.

Dunia digital sudah memasuki industri keuangan seperti *e commerce* yang semakin meningkat transaksinya dari hari ke hari. Masyarakat di era digital ini menginginkan dan menyukai kemudahan. Mereka dengan terbuka akan menerima segala keterbukaan dan kemajuan teknologi. Di industri keuangan sendiri sudah ada berbagai uang elektronik yang dimaksudkan untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia sehari hari. Mulai dari uang elektronik yang tertempel di handphone hingga saldo di aplikasi tertentu untuk memudahkan pembayaran. Peluang dan tantangan di era digital ini akan dirasakan oleh semua sektor termasuk industri keuangan dan juga industri perbankan.

Di industri keuangan seperti pasar modal, tantangan terbesarnya ialah ketika pasar modal tidak lagi melihat peluang yang terjadi di era digital ini. Apabila pasar modal menanggapi kemajuan digital ekonomi ini dengan baik, maka pasar modal dapat menjaring banyak investor baru khususnya dari anak muda. Dengan mudahnya akses ke pasar modal yang tidak lagi terbatas, Dalam waktu yang cukup lama, pasar modal hanya terpusat di pulau jawa, sedangkan potensi investor dari luar pulau jawa cukup potensial. Dengan berkembangnya digital ekonomi, pasar modal akan menjangkau investor dari luar jawa. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pembuatan sistem online untuk para investor yang saat ini sudah diterapkan dan dikembangkan di pasar modal.

Selain itu inovasi yang bisa terus dikembangkan ialah dengan membuat dan menjalankan sistem transaksi surat utang

secara elektronik. Pendaftaran perusahaan *go public* di luar jawa juga akan lebih mudah, cepat dan juga efisien. OJK saat ini sudah melakukan berbagai rangkaian persiapan penerapan pendaftaran elektronik yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu pada tahap pertama ialah registrasi online untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang atau Sukuk, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk Untuk Penawaran Umum Terbatas, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan Pernyataan Penawaran Tender (wajib dan sukarela) akan dilakukan pada tahap kedua yaitu pada 2018 - 2019.

Sementara pada industri perbankan, tantangan di dunia digital ini semakin keras. Hal ini karena bank tidak hanya bersaing dengan bank lainnya, namun di era digital ekonomi ini bank juga harus bersaing dengan perusahaan teknologi keuangan lainnya yang menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Menurut para ahli keuangan salah satunya Mckinsey memprediksi terdapat risiko penurunan profit pada perbankan di tahun 2025 sebesar 60 persen dari bisnis pembiayaan, 35 persen pada SME lending dan payment channel, 30 persen pada *wealth management*, dan 30 persen pada *mortgage*. Namun, hal ini bukanlah ancaman yang berarti apabila perbankan melihatnya dari sisi yang positif. Perbankan bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menghadapi persaingan yang ketat ini. Hingga saat ini sudah ada 45 persen lembaga keuangan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya.

Tantangan terbesar bagi perbankan ialah perubahan perilaku para nasabahnya. Para nasabah saat ini lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan juga hemat waktu. Para nasabah menyukai cara bertransaksi yang tidak lagi dibatasi waktu dan juga tempat, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi perbankan di dunia digital ini. Tantangan yang tidak kalah mengkhawatirkan

ialah terjadinya tren penurunan margin. Hal ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat diantara pelaku usaha yang menyebabkan penurunan kualitas kredit dan juga dikarenakan kebijakan terhadap besar kecilnya suku bunga dasar pinjaman. Untuk menghadapi segala tantangan ini bank harus melakukan penyesuaian atas perubahan kebutuhan mendasar.

Pada tahun 2013, 95.5 persen transaksi di Indonesia dilakukan secara cash (Bank Indonesia, 2013). Sampai dengan tahun 2014, transaksi secara cash masih mendominasi (KPMG, 2017). Walaupun demikian, sesuai survey mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang diadakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia) pada tahun 2016, terdapat potensi pertumbuhan transaksi digital dari kelompok masyarakat pengguna internet dan telepon selular terutama mahasiswa dan pelajar. Sebanyak 132.7 juta jiwa penduduk Indonesia (atau 51 persen dari total jumlah penduduk) telah mengakses internet.

Sebanyak 71.6 persen pengguna internet merupakan penduduk berusia produktif atau usia kerja (25 - 54 tahun). Terkait dengan aktivitas transaksi online, sebanyak 70.4 persen pengguna internet merasa yakin dan aman untuk melakukan transaksi perbankan secara online dan sebanyak 49 persen dari pengguna internet sudah melakukan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas digital banking seperti ATM, internet banking, kartu kredit, SMS banking, dan e-money. Sebagian besar pengguna internet mengakses internet melalui telepon seluler dan komputer dengan penetrasi pengguna internet terbesar adalah pada kelompok mahasiswa (89.7 persen) dan pelajar (69.8 persen).

Kelompok inilah yang diprediksi akan menyumbang pendapatan terbesar bagi industri perbankan dan layanan keuangan 10 tahun mendatang (McKinsey, 2015). Tren ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat Indonesia terutama melalui telepon seluler, pada kelompok masyarakat dengan usia produktif, mahasiswa, dan pelajar.



#### **4. Tantangan Industri Perbankan**

Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kapasitas Pertumbuhan Kredit perbankan yang Masih Rendah**

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam waktu lima tahun ke depan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.

Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan *core banking skills* yang relatif belum baik, dan biaya operasional yang relatif tinggi.

##### **2. Struktur Perbankan yang Belum Optimal**

Belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar (yang menguasai 75 persen aset perbankan Indonesia). Namun demikian bank-bank kecil dalam hal ini perlu mendapat perhatian karena selain jumlahnya relatif banyak, bank-bank kecil tersebut juga memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar namun dengan kemampuan operasional, manajemen risiko, dan corporate governance yang relatif lebih terbatas. Demikian pula, dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan nampak cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia. Hal ini juga merupakan persoalan tersendiri terhadap struktur perbankan karena dapat

menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu efisiensi pasar.

### **3. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan Perbankan yang Dinilai oleh Masyarakat Masih Kurang**

Kurangnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan ditandai dengan seringnya terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya akses terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit serta masih banyaknya praktek penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan, karena walaupun kredit korporasi dan UKM sudah mulai tumbuh, tingkat penetrasi kredit masih relatif rendah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas jasa dan produk keuangan sebagai akibat dari globalisasi sektor keuangan juga memerlukan respons yang memadai dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini semakin penting mengingat masyarakat pengguna jasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi.

### **4. Pengawasan Bank yang Masih Perlu Ditingkatkan**

Pengawasan bank juga merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa prinsip-prinsip prudensial yang masih belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan SDM pengawasan yang belum optimal, dan pelaksanaan *law enforcement* pengawasan yang belum efektif. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kapabilitas pengawasan ini sejalan dengan usaha Bank Indonesia untuk menerapkan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, termasuk meningkatkan sarana teknologi pengawasan. Mengingat pengawasan bank merupakan bidang yang sangat

dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus menerus oleh Bank Indonesia maupun oleh lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saatnya nanti.

## **5. Kapabilitas Perbankan yang Masih Lemah**

Lemahnya kapabilitas perbankan ditandai dengan kurangnya corporate governance dan core banking skills pada sebagian besar perbankan sehingga diperlukan perbaikan yang cukup mendasar pada dua hal tersebut. Meskipun kapabilitas beberapa bank besar sudah cukup kuat, namun kapabilitas perbankan secara umum masih di bawah *international best practices*. Demikian pula kemampuan bank dalam me-respon meningkatnya risiko operasional masih perlu terus diperbaiki, terutama penekanannya pada pentingnya internal control dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prudensial.

## **6. Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank yang Tidak *Sustainable***

Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang sustainable. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur aktiva produktif bank-bank. Margin yang diperoleh bank-bank semakin mengecil karena adanya kecenderungan suku bunga yang menurun. Faktor lain dari tidak sustainable-nya profitabilitas dan efisiensi adalah karena sebagian pendapatan perbankan berasal dari aktivitas trading yang fluktuatif serta rendahnya rasio asset per nasabah yang membuat biaya operasional perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain.

## **7. Perlindungan Nasabah yang Masih Harus Ditingkatkan**

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian

besar masyarakat kita. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar- standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan perlu segera diupayakan sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan.

## **8. Perkembangan Teknologi Informasi**

Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi (TI) menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko- risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu, persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## BAHAN BACAAN

- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Analisa kritis atas keuangan* (Edisi Pertama Cetakan Ketiga). Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada.
- Hasibuan, Melayu SP. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Keuangan : Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)* . Buku I Edisi 4. Yogyakarta : BPFE.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Lesmana, Rico dan R.Surjanto. 2006. *Financial Performance Analizing: Pedoman Menilai Kinerja Keuangan untuk Perusahaan Tbk, Yayasan, BUMN dan Organisasi Lainnya*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Martono dan D.Agus Harjito. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Ekonisia.
- Ridjin, Ketut. 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

- Riyanto, Bambang. 2000. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Cetakan Keenam. Yogyakarta : BPFE.
- Riyanto, Bambang. 1998. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Cetakan Keempat. Yogyakarta : BPFE.
- Sastrohadiwiryo, S. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia : Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Cetakan Kedua. Jakarta : Bumi Aksara
- Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schuler, Randal S. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Menghadapi Abad 21*. Jakarta : Erlangga.
- Setia Atmaja, Lukas. 2002. *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta : PT Salemba Empat.
- Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlian. 2005. *Manajemen Keuangan Satu*. Klaten : PT Intan Sejati.
- Supangkat, Harry. 2005. *Buku Panduan Direktur Keuangan*. Jakarta : PT Salemba Empat.
- Sutrisno. 2005. *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyono. 2005. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Syamsuddin, Lukman. 2002. *Manajemen Keuangan Perusahaan konsep aplikasi dan perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

## TENTANG PENULIS



Muh. Taslim Dangnga, menyelesaikan pendidikan Sarjana pada tahun 1985 di IKIP Ujung Pandang. Pada tahun 2004 menyelesaikan program magister di Universitas Hasanuddin. merupakan staf pengajar pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UNM. Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, juga penulis dan pemakalah pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.



M. Ikhwan Maulana Haeruddin menamatkan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2004. Karir akademiknya dimulai pada tahun 2005 sebagai Asisten dosen pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dan menjadi dosen tetap di tahun 2008 sampai saat ini. Pada tahun 2007, penulis mendapatkan gelar Master of Human Resource Management di The University of Newcastle, Australia. Gelar Doctor of Philosophy in Management didapatkan penulis pada tahun 2017 di Curtin University of Technology, Australia. Selain aktifitas mengajar di kampus, saat ini penulis juga menjadi konsultan dan *trainer* manajemen Sumber Daya Manusia pada Cipta Daya Sinergi Consultant. Selain itu, penulis telah menghasilkan karya-karya ilmiah telah dipublikasikan dan diseminasikan pada skala lokal, regional, dan internasional. Fokus Penelitian penulis saat ini adalah pada topik *identity work* dan *gender in management*, selain topik-topik lain pada bidang Manajemen umum dan perilaku organisasi.